

**ANALISIS PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES  
PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DI DPRD  
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2009**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk menyelesaikan  
Program Strata Satu (SI) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu  
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau**



**Oleh:**

**NURHAYATI  
10775000166**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2011**

## **ABSTRAKSI**

### **ANALISIS PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ( PASAL 8 (1) UU NO. 10 BUTIR D TAHUN 2008) PERIODE 2009-2014**

Oleh:

**NURHAYATI**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan relatif rendahnya partisipasi perempuan sebagai calon legislatif pada partai politik peserta pemilu legislatif kabupaten pelalawan tahun 2009, Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sampel adalah 18 partai politik yang tidak memenuhi syarat 30% perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif dimana kedelapan belas partai ini juga ikut bertarung dalam pemilihan calon legislatif tahun 2009, Analisis data metode deskriptif untuk menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai implementasi kebijaksanaan UU No.10 tahun 2008 pasal 8 ayat 1 butir D data tersebut disajikan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan. Dari hasil penelitian, berdasarkan jawaban responden tentang tingkat pendidikan formal yang dimiliki perempuan yang merupakan calon legislatif adalah tamatan SMA dan diploma kemudian berdasarkan jawaban responden tentang pengalaman organisasi menyatakan kurang baik karena pengalaman organisasi yang dimiliki kurang dari lima tahun. Sistem rekrutmen yang diterapkan belum sepenuhnya baik karena didasarkan sistem informal sehingga kaum perempuan tidak terwakili di lembaga legislatif dan akibatnya 30% perempuan di lembaga legislatif tidak tercapai serta aspirasi perempuan di DPRD kabupaten pelalawan tidak tersalurkan secara baik, kemudian sistem patriarki yang memandang perempuan kurang dapat berperan di lembaga legislatif dan pemimpin jabatan politik lainnya, sehingga kaum perempuan tersebut termarginalkan baik dari segi formal maupun nonformal, padahal kedudukan perempuan sejajar dengan laki-laki dan berhak untuk menjadi pemimpin.*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:” Analisis partisipasi perempuan dalam proses pencalonan anggota Legislatif di DPRD Kabupaten Pelalawan Tahun 2009” penulisan skripsi ini guna untuk memenuhi syarat gelar sarjana S1 di perguruan tinggi UIN SUSQA Riau, Khususnya di fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial, sholawat dan salam penulis sampaikan buat Nabi Muhammad SAW yang merupakan contoh tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan ini izinkanlah penulis ingin mengucapkan Terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda(Idrus dan Sarmida) yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil serta Doa Restu yang tulus demi penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nazir Karim, M.A. sebagai Rektor Universitas islam Negeri sultan syarif khasim Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini.
3. Bapak Mahendra Romus S.p. M.E.C selaku Dekan Fakultas Ekonomi islam negeri sultan syarif khasim Riau.
4. Bapak Al-Masri M.si, selaku ketua jurusan Administrasi Negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial.
5. Bapak Rusdi S.sos, M.A. selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Kamaruddin, S.sos M.si Selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak dan ibu Dosen jurusan Administrasi Negara fakultas Ekonomi dan ilmu sosial yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi.
8. Terima kasih Buat pak Ali Mutadin S.sos. M.si yang telah membantu saran dan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
9. Buat saudaraku Masraini S.Pd. Yanhur, Elva Rianti khususnya Kakek dan Nenekku beserta keluarga besarku
10. Buat Indah wati yang juga membantu menuangkan ide dan pemikiran dalam skripsi saya.
11. Buat sahabat-sahabatku Ika Putri Dani, rospita, Tri Herlinda, Safitri wulan sari serta nama-nama yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini.
12. Buat keponakan ku yang Tasya Aulia Putri
13. Buat teman-teman alumni SMA I Langgam Kabupaten Pelalawan

Penulis mohon maaf kepada pembaca yang mana dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik itu dalam penulisan maupun penyusunan kata-kata, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, namun dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima segala kritikan dan saran yang sifatnya positif dan membangun untuk penulis.

Pekanbaru, 2011

NURHAYATI  
10775000166

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
1. Tujuan Penelitian .....	14
2. Kegunaan Penelitian .....	15
1.4 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
2.1 Kerangka Teoritik .....	18
2.2 Partisipasi Perempuan dalam Politik.....	18
1. Pengertian Partisipasi Politik .....	18
2. Jenis-Jenis Partisipasi.....	19
3. Asas-Asas Partisipasi Politik Perempuan.....	20
4. Tujuan Partisipasi Politik Perempuan .....	21
5. Persyaratan Partisipasi Politik.....	22
6. Partisipasi Politik Perempuan .....	25

7. Partisipasi Perempuan dalam Daftar Calon Legislatif	
Perempuan.....	33
2.3 Kerangka Pikiran.....	35
2.4 Definisi Konsep dan Konsep Operasional.....	38
2.4.1 Definisi Konsep .....	38
2.4.2 Konsep Operasional .....	39
2.5 Teknik Pengukuran .....	41
2.6 Hipotesis.....	45
2.7 Variabel Penelitian .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Lokasi Penelitian.....	46
3.2 Populasi Sampel .....	46
a. Populasi.....	46
b. Sampel.....	46
3.3 Jenis Data .....	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5 Analisa Data .....	48
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH KABUPATEN</b>	
<b>PELALAWAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Sejarah Pelalawan .....	50
4.2 Sejarah DPRD Kabupaten Pelalawan .....	58
4.3 Letak Geografis Kabupaten Pelalawan .....	58
4.4 Visi dan Misi Kabupaten Pelalawan .....	60

4.5 Struktur Wilayah .....	62
4.6 Penduduk.....	62
<b>BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
5.1 Analisis Partisipasi Perempuan dalam Proses Pencalonan Anggota Legislatif di DPRD Kabupaten Pelalawan Tahun 2009.....	63
1. Pendidikan Formal .....	65
2. Pengalaman Organisasi .....	66
3. Sistem Rekrutmen .....	71
4. Persepsi sosial .....	77
5. Persepsi Budaya .....	82
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>87</b>
6.1 Kesimpulan .....	83
6.2 Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>GRAFIK</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Nama-Nama Calon Legislatif yang Terpilih Pada Pemilihan 2009 .....	6
Tabel 1.2 : Persentasi Calon Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Pelalawan 2009 .....	10
Tabel 1.3 : Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Daerah Pemilihan .....	12
Tabel 3.1 : Jumlah Penyebaran Sampel Dalam Penelitian .....	48
Tabel 5.1 : Tanggapan Responden Tentang Pendidikan Formal.....	64
Tabel 5.2 : persentase pendidikan yang dimiliki perempuan sebagai calon legislatif tahun 2009 .....	65
Tabel 5.2 : Tanggapan Responden Tentang Tingkat Pengalaman Organisasi Kader Harus Minimal 5 Tahun yang Dimiliki Kader Partai dari Kaum Perempuan Pada Umumnya .....	66
Tabel 5.3 : Tanggapan Responden Tentang Pengalaman Organisasi Dimiliki Kader Partai dari Kaum Perempuan pada Umumnya.....	67
Tabel 5.4 : Tanggapan Responden Tentang Pengalaman Organisasi yang Dimiliki Kader Partai dari Kaum Perempuan .....	68
Tabel 5.5 : Tanggapan Responden Tentang Sistem Rekrutmen Terhadap Kader Perempuan Sebagai Calon Legislatif Partai Politik .....	71
Tabel 5.6 : Tanggapan Responden Tentang Kualifikasi Calon Kader Terhadap Kader Perempuan Sebagai Calon Legislatif Partai Politik.....	71
Tabel 5.7 : Tanggapan Responden Tentang Sistem Rekrutmen Terhadap Kader Perempuan.....	73
Tabel 5.8 : Tanggapan Responden Tentang Persepsi Sosial dan Agama Terhadap Calon Legislatif Perempuan .....	77
Tabel 5.9 : Tanggapan Responden Tentang Kebiasaan Calon Kader Terhadap Lingkungan Sekitar Terhadap Calon Legislatif Perempuan.....	78
Tabel 5.10 : Tanggapan Responden Tentang Persepsi Sosial Calon Kader Perempuan .....	79



Tabel 5.11	:	Tanggapan Responden Tentang Persepsi Budaya (Kultural) Terhadap Calon Legislatif Perempuan.....	82
Tabel 5.12	:	Tanggapan Responden Tentang Sejauhmana Persepsi Budaya Legislatif Perempuan Dalam Suatu Partai Politik...	83
Tabel 5.13	:	Tanggapan Responden Tentang Persepsi Budaya Terhadap Calon Kader Perempuan .....	83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Peran perempuan di Tanah air telah dimulai sejak zaman penjajahan munculnya tokoh perempuan indonesia seperti R.A Kartini R.Dewi Sartika dan cut Nyak Dien dapat menjadi contoh. Harus diakui bahwa meski sudah banyak tokoh perempuan yang sukses. Namun pada sisi lain masih banyak pula hambatan yang dialami kaum perempuan untuk tampil dalam sektor publik. Misalnya. Terkait peran perempuan dalam politik, hampir diseluruh Negara. Khususnya di Negara berkembang menghadapi sejumlah kendala baik struktural maupun Kultural.

Kendala struktural tersebut sering kali berkaitan dengan permasalahan pendidikan, status sosial, ekonomi, dan pekerjaan. pekerjaan Perempuan masih sering diidentikkan dengan pekerjaan “kelas dua” yang sulit berimbang dengan laki-laki. Sementara kendala kultural terkait dengan faktor budaya dalam masyarakat seperti menempatkan perempuan sebagai untuk sekedar tinggal dirumah. Kini konsep kesetaraan gender dianggap sebagai sebuah jawaban untuk mengatasi persoalan perempuan tersebut. Gerakan ini sudah berkembang menjadi gerakan massal yang sangat berpengaruh.

Reformasi yang dialami bangsa Indonesia 1998 membawa perubahan pada sistem politik terutama sistem pemilu. Perubahan ini membuka peluang bagi setiap elemen bangsa untuk terlibat didalamnya. Menuju kehidupan demokrasi

yang lebih baik. Bagi kaum perempuan di Indonesia. Perubahan sistem politik itu juga memberi harapan bagi mereka untuk dapat memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata. Perubahan dalam sistem pemilu antara lain diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan umum anggota DPR DPD dan DPRD Lembaga Legislatif merupakan legitimasi kuota 30% bagi keterwakilan perempuan sebagai caleg dari partai politik. Dan jumlah partai politik peserta pemilu tidak lagi dibatasi sehingga ada partai politik yang mengatas namakan kaum perempuan Indonesia.

Kuota anggota legislatif perempuan sekurang-kurangnya 30% di partai politik dan parlemen. Merupakan kebijakan yang positif bagi pemberdayaan partisipasi politik perempuan. Jumlah pemilih dalam pemilu 2004 lebih dari 51% nya adalah perempuan. Seharusnya, idealnya kaum perempuan secara struktural memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi politisi, dibandingkan pada pemilu sebelumnya. Namun kenyataannya tidaklah demikian, sebab jalan bagi munculnya banyak politisi perempuan di Indonesia masih banyak menghadapi kendala. Baik dari kaum perempuan itu sendiri maupun kondisi riil politik, dan sosial budaya yang acap kali belum mensupport keberadaannya di dunia politik.

Upaya mencapai kuota minimum jumlah perempuan di parlemen tidak bisa dilepaskan dengan upaya peningkatan kualitas dari kaum perempuan itu sendiri. Tanpanya. Kesempatan apapun yang diberikan melalui ketentuan untuk memberikan ruang politik yang lebih luas lagi bagi perempuan, tidak akan menghasilkan perbaikan yang berarti. Dengan demikian, diperlukan upaya sistematis dan terprogram untuk meningkatkan kapasitas politik perempuan. Salah

satu kendala untuk terlaksananya peningkatan kapasitas perempuan dalam arena politik masih adanya pandangan yang kuat dimasyarakat yang menempatkan kaum perempuan hanya mengurus suami dan anak-anak. Aktivitas, perempuan dipangung politik, di Indonesia dewasa ini masih merupakan sesuatu yang dianggap tabu.

Beberapa pertimbangan atau alasan mengapa perempuan perlu terlibat dalam proses politik, dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan dan jabatan politik adalah:

- a. Perempuan adalah warga Negara yang jumlahnya hampir berimbang dengan laki-laki yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki (UU No.7 tahun 1984 tentang konvensi perempuan).
- b. Sedikitnya perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat dapat dianggap merupakan ancaman bagi keabsahan (legitimasi) sistem penyelenggaraan demokrasi, karena setiap saat para pemilih pendukung (konstituen) yang sebagian besar adalah perempuan dapat menarik kembali kepercayaannya atau mencabut mandatnya, apabila para wakil rakyat terpilih tidak memenuhi janji untuk membela dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan perempuan.
- c. Partisipasi politik berkaitan dengan memperjuangkan dan menegakkan hak dan kepentingan seluruh rakyat secara merata dan adil termasuk kelompok perempuan.
- d. Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan di politik (Partai politik, lembaga legislatif, dan sebagainya).

Sejak lama Indonesia mengupayakan pemberdayaan perempuan dalam peta perpolitikan. Undang-Undang dasar 1945, secara formal telah menjamin partisipasi perempuan dalam bidang politik. Pada tahun 1952 misalnya, Indonesia meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak perempuan (Universal Convention on Political Right of Women) melalui UU Nomor 68 tahun 1958 Tentang Persetujuan konvensi hak-hak politik kaum wanita, dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno saat itu. Undang-Undang ini memberikan perempuan hak untuk memilih dan dipilih dalam lembaga legislatif negara.

Beberapa langkah yang harus dilakukan partai politik dalam hubungannya dengan partisipasi perempuan dalam politik antara lain menyangkut lima hal, pertama melakukan perubahan dalam struktur internal partai- partai politik, tentu saja hal ini memerlukan proses demokrasi yang transparan yang memungkinkan perempuan lebih terlibat dalam partai sebagai anggota atau fungsionaris partai, kedua mencantumkan kualifikasi atau syarat-syarat menjadi kandidat atau calon legislatif dengan prinsip kesetaraan gender yang terukur dan transparan.

Hingga perempuan lebih dapat berkiprah dan berkompetisi ketika mencalonkan diri, ketiga, membentuk apa yang disebut komite kesetaraan gender yang tugasnya mengkaji berbagai aturan dan kebijakan dalam perekrutan kandidat dan posisi kepemimpinan dalam partai politik, keempat, menyertakan minimal 30% calon legislatif perempuan, dan didasarkan lewat metode silang,

Yakni nama-nama calon legislatif dituliskan bersilang antara calon legislatif laki-laki dan calon legislatif perempuan. Terakhir yang kelima, menetapkan 30% perempuan sebagai calon anggota pengurus partai politik.

Dalam beberapa partai politik masih sedikit sekali dan belum banyak yang menduduki jabatan-jabatan yang menentukan dalam pengambilan keputusan. Kedudukan perempuan dalam partai lebih banyak didudukkan pada posisi sebagai sekretaris, humas, bendahara, atau ketua departemen kewanitaan, posisi yang sejak lama sudah melekat dan menjadi identitas sebagai posisi kaum perempuan.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 Tentang mengatur fungsi dan kewajiban partai politik dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam bidang politik, Sedangkan UU Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR DPD DPRD menggaris bawahi setiap partai politik peserta pemilu mengajukan anggota calon legislatif untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan partisipasi perempuan sekurang-kurangnya 30% dengan kuota 30% perempuan diharapkan dapat mengambil posisi strategis di lembaga legislatif dan dapat mewarnai kebijakan negara.

Jika kita melihat kedalam tubuh partai politik, dalam kepengurusan periode antara tahun 1999 sampai tahun 2005. dari tujuh partai politik yang memiliki suara pemilih terbesar pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 sesungguhnya jumlah kader perempuan yang menjadi pengurus partai masih sedikit. Ada tujuh partai politik yang dimaksud yaitu partai golongan karya, partai demokrasi indonesia perjuangan, partai kebangkitan bangsa, partai persatuan pembangunan, partai demokrat, partai amanat nasional, dan partai keadilan sejahtera,. Partai-partai inilah yang memainkan peranan besar dalam

perumusan kebijakan dalam banyak persoalan di parlemen. Termasuk persoalan dan isu yang menyangkut permasalahan perempuan.

Selain merupakan partai dengan perolehan suara terbesar dalam pemilu legislatif 2009 , lebih dari 500 kursi di Dewan perwakilan rakyat merupakan perwakilan dari tujuh partai tersebut..

Adapun calon-calon dari partai tersebut yang memenangkan kursi di DPRD kabupaten Pelalawan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Nama-Nama Calon Legislatif Yang Terpilih Pada Pemilihan 2009**

<b>Nama Partai</b>	<b>Calon yang terpilih</b>
Hanura	H.Herman Maskar spd,Msi.
	H.Mukhlis Ali
PPRN	Syahrudin
PKS	Markarius Anwar,ST,Msc
PAN	Ikmal M
	Nazarudin Arnaz
	Habibi Hapri
Kedaulatan	Ismael Muctar,Bsc
PPD	Ali Amran
PKB	Rahman Wijayanto
PPDI	Eliman Manurung
Republikan	Tengku Khairul,ST
Golkar	H.Zakri
	Eka Putra
	Darmawan
	Imustiar, S.IP
	H. Agustiar, SE
	Marhadi MR
	Sunardi
PPP	Jhon Hendri Hasan
	Akhiruddin
PDIP	Drs. Sozifao Hia
	Supriyanto, SP
	Supriyanto Agustinus
	Kasyadi
PBR	Indra
	H. Husni Thamrin

Demokrat	Monang Pasaribu
	Drs. H. Anas Badrun
	Josen Silalahi

**Sumber:** KPU Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan deskripsi diatas, tidak ada satupun perempuan yang tewakili di DPRD kabupaten pelalawan rata-rata dari semua partai yang mencalonkan diri kebanyakan dari mereka yang terpilih hanya laki-laki sehingga tidak ada perempuan yang menjadi ahli poitik di DPRD kabupaten pelalawan dan jumlah perempuan yang ikut berpartisipasi dalam proses pencalonan anggota legislatif pun sangat rendah.

Terdapat kendala-kendala atau hambatan-hambatan apakah bersifat internal diperempuan itu sendiri maupun eksternal yang terdapat di lingkungan. Center of Asia-Pacific women in politics membagi hambatan tersebut dalam dua hambatan utama.

1. Bertahannya peran dan pembagian gender tradisional, stereotif perempuan: pengikut (followers), dan bukan pemimpin (leaders) dikaitkan dengan faktor-faktor di bawah ini.
  - a. Prioritas perempuan adalah keluarga.
  - b. Perempuan tidak memenuhi syarat dalam posisi kepemimpinan.
  - c. Ranah publik adalah dunianya laki-laki
  - d. Posisi stereotif yang terbuka bagi perempuan
  - e. Banyaknya beban menghambat partisipasi politik perempuan
  - f. Harapan publik atas penerimaan peran kepemimpinan perempuan



2. Kendala kelembagaan (institusional) yang masih kuat atau akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar dikelembagaan sosial, politik kendala-kendala tersebut dibagi kedalam berbagai faktor, yaitu:

- a. Kurangnya kehendak politik (political will)
- b. Kurangnya “critical Mass” massa kritis perempuan di dunia politik
- c. Keberadaan dan kuatnya” jaringan laki-laki semua” all boys club.
- d. Akses yang berbeda terhadap sumber-sumber politik
- e. Sistem pemilihan umum.

Selain faktor penghambat diatas, dapat ditambahkan faktor-faktor penghambat berikut ini, antara lain: pertama, berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkatnya, Kedua erat kaitannya dengan proses seleksi dalam partai politik, seleksi dilakukan dengan menggunakan oligarki partai, segelintir elit partai didominasi oleh kalangan laki-laki. Ketiga, media massa sangat memegang peranan penting dalam membangun opini masyarakat akan keselarasan dan persamaan hak-hak setiap warga negara tanpa pembatasan jenis kelamin.

Keempat, tidak adanya jaringan antar organisasi massa LSM dan partai politik untuk memperjuangkan aspirasi perempuan (networking) kelima, sistem pemilu yang menggunakan sistem representasi proporsional dengan daftar tertutup. Ini membuat pemilih perempuan tidak tahu siapa yang mewakili perempuan di parlemen. Keenam, faktor-faktor keluarga seringkali menghambat gerak perempuan dalam berpolitik, izin dari pasangan seringkali menjadi

hambatan dari pasangan dalam aktifitas politik perempuan. Ketujuh, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan.

Fakta menunjukkan bahwa meskipun sudah 63 tahun Indonesia merdeka, Sembilan kali menyelenggarakan pemilihan umum, bahkan pemilu 2004 yang dianggap paling demokratis sekalipun, partisipasi perempuan dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan publik masih tetap rendah, baik di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di lembaga perwakilan rakyat, wakil rakyat masih didominasi laki-laki, baik di tingkat nasional, sebesar 89%, tingkat Propinsi 92%, maupun tingkat Kabupaten/Kota 100% anggotanya laki-laki dengan kata lain tidak ada perempuan yang terlibat dalam menentukan prioritas dan merumuskan kebijakan publik. Hal yang sama juga kita jumpai di lembaga eksekutif dan yudikatif, serta lembaga politik lainnya, termasuk partai politik.

Berdasarkan implementasi UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPRD DPD dan DPRD harus minimal 30%, dari sekian banyak pemilu yang dilaksanakan baru sembilan partai politik atau kurang dari 30% partai politik peserta pemilu yang mengajukan calon legislatif perempuan, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 1.2 Persentasi Calon Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD  
Kabupaten Pelalawan 2009**

NO	Nama Partai Politik	Caleg Perempuan	Caleg Laki-Laki	Jumlah Caleg	Ketewakilan Perempuan (%)
1	Partai Serikat Indonesia	2 Orang	4 Orang	6 Orang	30
2	<b>Partai Buruh Sosial Demokrat</b>	2 Orang	6 Orang	8 Orang	25
3	<b>Partai Merdeka</b>	- Orang	- Orang	- Orang	-
4	<b>Partai Nahdatul Ummah Indonesia</b>	2 Orang	7 Orang	9 Orang	22
5	Partai Indonesia Sejahtera	4 Orang	9 Orang	13 Orang	29
6	Partai Kebangkitan Nasional Ummah	5 Orang	5 Orang	10 Orang	50
7	Partai Demokrat	10 Orang	24 Orang	34 Orang	29
8	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	3 Orang	7 Orang	10 Orang	30
9	Partai Bintang Reformasi	9 Orang	21 Orang	30 Orang	30
10	<b>Partai Patriot Pancasila</b>	3 Orang	5 Orang	8 Orang	27
11	Partai Bulan Bintang	5 Orang	7 Orang	12 Orang	40
12	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	5 Orang	15 Orang	20 Orang	25
13	Partai Damai Sejahtera	3 Orang	7 Orang	10 Orang	30
14	<b>Partai Nasional Benteng Kerakyatan</b>	1 Orang	6 Orang	7 Orang	14
15	<b>Partai Golongan Karya</b>	7 Orang	2 Orang	9 Orang	24
16	Partai Pesatuan Pembangunan	8 Orang	20 Orang	28 Orang	29
17	Partai Republika Nusantara	6 Orang	7 Orang	12 Orang	42
18	Partai Pelopor	3 Orang	6 Orang	9 Orang	31
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	4 Orang	6 Orang	10 Orang	40
20	<b>Partai Demokrasi Kebangsaan</b>	2 Orang	15 Orang	17 Orang	12
21	Partai Karya Perjuangan	3 Orang	7 Orang	10 Orang	30
22	<b>Partai Matahari Bangsa</b>	3 Orang	10 Orang	13 Orang	23
23	<b>PNI Marhaenisme</b>	1 Orang	6 Orang	7 Orang	14
24	Partai Demokrasi Pembangunan	3 Orang	5 Orang	8 Orang	38
25	Partai Kebangkitan Bangsa	4 Orang	7 Orang	11 Orang	36
26	Partai Pemuda Indonesia	3 Orang	6 Orang	9 Orang	33
27	Partai Kedaulatan	4 Orang	8 Orang	12 Orang	33
28	<b>Partai Persatuan Daerah</b>	3 Orang	8 Orang	11 Orang	27
29	<b>Partai Amanat Nasional</b>	3 Orang	23 Orang	26 Orang	12
30	<b>Partai Perjuangan Indonesia Baru</b>	- Orang	2 Orang	2 Orang	0
31	<b>Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia</b>	- Orang	2 Orang	2 Orang	0
32	Partai Keadilan Sejahtera	8 Orang	19 Orang	27 Orang	30
33	<b>Partai Gerakan Indonesia Raya</b>	2 Orang	8 Orang	10 Orang	20
34	Partai Barisan Nasional	3 Orang	5 Orang	8 Orang	38
35	<b>Partai Pengusaha Dan Kerja Indonesia</b>	- Orang	- Orang	- Orang	-
36	<b>Partai Peduli Rakyat Indonesia</b>	2 Orang	9 Orang	11 Orang	18
37	<b>Partai Hati Nurani Rakyat</b>	7 Orang	19 Orang	26 Orang	27

38	Partai Karya Peduli Bangsa	4 Orang	8 Orang	12 Orang	30
	JUMLAH				

*Sumber : KPU Kabupaten Pelalawan 2009*

Berdasarkan tabel diatas masih banyak partai politik yang belum memenuhi 30% partisipasi perempuan bahkan dapat dilihat bahwa masih ada partai politik yang tidak mengikutsertakan kaum perempuan dari partainya sama sekali. Partai-partai itu adalah: Partai merdeka, partai Nahdatul Ummah indonesia, partai nasional benteng kerakyatan, partai demokrasi kebangsaan, partai golkar, partai matahari bangsa, partai marhaenisme, partai amanat nasional, partai perjuangan indonesia baru, partai keadilan dan persatuan indonesia, partai gerakan indonesia raya, partai pengusaha dan kerja indonesia, partai peduli rakyat indonesia.

Mengingat demikian besarnya jumlah penduduk perempuan di indonesia yang saat ini mencapai 51 persen dan bahkan pada pemilu 1999 persentase jumlah pemilih perempuan 57 persen, maka selayaknya kaum Perempuan mendapat posisi kedudukan yang menentukan khususnya dalam partai politik, dewan perwakilan maupun pemerintahan.

Metode yang tepat diterapkan adalah sistem kuota. Sistem kuota dimaksudkan untuk menjamin partisipasi perempuan dengan merekrutnya untuk memasuki posisi-posisi jabatan politik. Sistem kuota menghendaki agar Partisipasi perempuan dalam berbagai lembaga politik maupun pemerintahan mencapai suatu persentase jumlah tertentu sehingga dapat mengatasi sebagian hambatan-hambatan bagi perempuan untuk masuk dalam kancah politik.

Memang dominasi kaum laki-laki dalam lembaga legislatif bukan berarti keputusan-keputusan yang dibuatnya tidak memperhatikan nasib kaum perempuan, dan besarnya partisipasi perempuan dalam keanggotaan dewan

perwakilan berarti akan menjamin aspirasi perempuan diutamakan. Namun, minimnya peran politik perempuan tersebut, baik dalam partai politik, dewan perwakilan maupun pemerintahan menjadi tidak proporsional, mengingat relatif besarnya persentase penduduk maupun jumlah pemilih perempuan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, tercapainya partisipasi perempuan yang proporsional selain akan mengembangkan peran dan partisipasi politik perempuan juga akan mendukung tercapainya hasil pembangunan.

Berikut jumlah kursi yang didapatkan perempuan berdasarkan daerah pemilihan dilihat dari jumlah penduduk.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Daerah Pemilihan.**

No	Daerah pemilihan	Jumlah penduduk	Jumlah kursi
1	Pelalawan satu	175. 613	9
2	Pelalawan dua	94. 477	9
3	Pelalawan tiga	81. 136	12

*Sumber : KPU Kabupaten Pelalawan*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari beberapa daerah pemilihan hanya empat kursi yang bisa didapatkan oleh perempuan yaitu daerah pemilihan pelalawan tiga dua orang dan pelalawan satu, satu orang artinya antara perempuan dan laki-laki memang sangat terlihat perbedaan baik dari segi kemampuan maupun dari segi kekuatan.

Untuk menjadi anggota legislatif setiap anggota calon harus mengetahui tata cara pencalonan anggota yang ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2003 pasal 65 Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPRD DPRD Prov dan DPRD Kabupaten atau kota untuk setiap daerah pemilihan

dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya tiga puluh persen atau harus menyertakan perempuan minimal 30%.

1. Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.
2. Pengajuan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Calon Anggota DPR,
  - b. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang diajukan partai politik peserta pemilu merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.
3. Partai politik peserta pemilu menyerahkan nama-nama calon seleksi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 beserta kelengkapan administrasi calon kepada KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang batas waktunya ditetapkan oleh KPU.
- 4.. Urutan nama calon dalam daftar nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh partai dan KPU peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya .

Pada pasal 8 ayat 1 UU No.10 Tahun 2008 telah mengisyaratkan bahwa setiap partai yang telah memenuhi syarat harus memenuhi Kuota partisipasi perempuan minimal 30% tetapi kenyataan berkata lain baru 8 partai politik yang telah melaksanakannya. partai politik sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi

harus memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada perempuan untuk lebih bisa berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan termasuk aktif dalam bidang politik.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis dengan judul: ***“Analisis Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pencalonan Anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan (Pasal 8 (1) UU No. 10 Butir D Tahun 2008)”.Periode 2009-2014***

## **1.2.Rumusan Masalah**

Meskipun sudah ditetapkan kuota partisipasi perempuan dalam daftar Calon Legislatif sekurang-kurangnya 30%, akan tetapi masih belum mampu meningkatkan partisipasi politik kaum perempuan, bahkan pada kenyataannya dengan kuota tersebut, partisipasi perempuan dalam keanggotaan parlemen, khususnya di DPRD kabupaten pelalawan masih relatif kecil. Padahal dalam pemilu Legislatif 2009 lalu, sebahagian besar partai politik peserta pemilu telah berusaha memenuhi kuota partisipasi perempuan tersebut dalam susunan calon legislatifnya.

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : ***“Analisis partisipasi perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif di DPRD Kabupaten Pelalawan Tahun 2009”***.

## **1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian**



### **1.31 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan relatif rendahnya partisipasi perempuan sebagai calon legislatif pada partai politik peserta pemilu Legislatif Kabupaten Pelalawan Tahun 2009.

### **1. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi negara dan juga dalam pembinaan partisipasi politik perempuan.
- b. Sumbangan pemikiran terhadap masalah-masalah yang dihadapi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.
- c. Referensi maupun sumber informasi bagi para peneliti selanjutnya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan proposal ini maka peneliti akan membagi bagian sistematika penulisannya yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini akan memuat antara lain:

- A. Latar belakang masalah
- B. Perumusan masalah
- C. Tujuan penelitian dan manfaat penulisan
- D. Sistematika penulisan

## BAB II : TELAAH PUSTAKA

### A. Partisipasi perempuan dalam politik

1. Pengertian partisipasi politik
2. Jenis-jenis partisipasi
3. Asas-asas partisipasi politik perempuan
4. Tujuan partisipasi politik perempuan
5. Persyaratan partisipasi politik
6. Partisipasi politik perempuan
7. Partisipasi perempuan dalam daftar calon legislatif partai politik
8. Persepsi sosial dan masyarakat terhadap calon legislatif perempuan

### B. Kerangka pikiran

### C. Definisi konsep dan konsep operasional

- 2.1 Definisi konsep
- 2.2 Konsep operasional
- 2.3 Teknik pengukuran
- 2.4 Hipotesis
- 2.5 Variabel penelitian

## BAB III : METODE PENELITIAN

### A. Lokasi penelitian

### B. Populasi sampel

### C. Jenis data

### D. Teknik pengumpulan data

E. Analisa data

**BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH KABUPATEN PELALAWAN**

4.1 Sejarah Kabupaten Pelalawan

4.2 Sejarah DPRD Kabupaten Pelalawan

4.3 Letak Geografis Kabupaten Pelalawan

4.4 Visi dan Misi

4.5 Struktur Wilayah

4.6 Penduduk

**BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN**

5.1 Analisis Partisipasi Perempuan Dalam Proses pencalonan anggota legislatif di DPRD Kabupaten Pelalawan Tahun 2009

1. Pendidikan Formal

2. Pengalaman Organisasi

3. sistem Rekrutmen

4. Persepsi Sosial

5. Persepsi Budaya

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan

6.2 Saran

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teoritik**

Dalam setiap penelitian, kerangka teori digunakan untuk memberikan landasan berpijak yang dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah. Kerangka teori dimaksud untuk memberikan gambaran dan batasan tentang teori-teori yang dijadikan sebagai pedoman atau landasan penelitian yang akan dilaksanakan. Sebelum penulis masuk kepada teori murni yang membahas penelitian ini, sedikit akan dipaparkan secara singkat tentang penelitian partisipasi.

#### **2.2 Partisipasi Perempuan dalam Politik.**

##### **1. Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi, asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

**Menurut H. Mc Closky,(1990).** partisipasi politik merupakan kegiatan suka rela dari warga negara melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak dalam proses pembentukan kebijakan umum. Sedangkan

**Menurut budiarjo (1981)**, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memiliki pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

## **2. Jenis-jenis Partisipasi**

**Milbrath dan Goel, (2003)**. Membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Pertama, “apatis” artinya “orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik”. Kedua, “Spektator” artinya “orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum”. Ketiga, “Gladiator” artinya “mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunitator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktifis partai, dan pekerja kampanye, dan aktifis masyarakat”. Keempat, pengkritik yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

Partisipasi politik dibedakan dalam dua aspek, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit berupa keikutsertaan dalam politik praktis dan aktif dalam segala kegiatannya, sedangkan dalam arti luas, berupa keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang mempunyai dampak kepada masyarakat luas, mempunyai kemampuan, kesempatan, dan kekuasaan, dalam mengambil keputusan yang mendasar yang menyangkut kehidupan orang banyak. (G. Tan 1992).

**Olsen, (2003)** memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Dia membagi partisipasi politik menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin

politik, aktivis politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide sikap, dan informasi politik lainnya kepada orang lain).

### **3. Asas-asas Partisipasi Politik Perempuan**

Partai politik yang didirikan menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik, mempunyai asas dan ciri sebagai berikut:

1. Asas partai politik boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Setiap partai politik dapat mencantumkan diri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya yang tidak bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan undang-undang.

Sedangkan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik, fungsi partai politik adalah sebagai:

- a. Sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat agar menjadi warga negara republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Sarana penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Sarana penyerap, penghimpun, dan penyaluran aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Sarana partisipasi politik warga negara, dan

- e. Sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender.

Dalam pasal 62 Undang-Undang 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum telah disebutkan bahwa : calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten selain harus memilih syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 juga harus terdaftar sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

Selanjutnya dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum telah disebutkan bahwa: calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang diajukan partai politik peserta pemilu merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.

Dari kutipan diatas dapat dikatakan bahwa untuk terpilih sebagai calon anggota suatu badan legislatif maka seseorang harus menjadi anggota organisasi partai politik peserta pemilu dan melewati mekanisme yang berlaku di dalam partai. Proses pencalonan merupakan salah satu kunci pokok bagi hadirnya wakil-wakil rakyat yang bertujuan untuk mempersiapkan anggota partai sehingga memiliki kompetensi dan kapabilitas yang diinginkan.

Pada umumnya partai politik peserta pemilu telah berupaya untuk memenuhi 30% kuota partisipasi perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Namun pada kenyataannya persentase perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif di banyak daerah masih sangat minim, karena pada akhirnya berhasil

tidaknya calon legislatif tergantung pada masyarakat yang memilihnya. Kualitas sumberdaya manusia serta sistem politik yang diterapkan.

#### **4. Tujuan Partisipasi Politik Perempuan**

**Menurut Carl J. Friedrich,(1990).** partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat riil maupun materil.

1. Tujuan umum partai politik adalah:
  - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
  - b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
  - c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Tujuan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.



## 5. Persyaratan Partisipasi Politik

Dalam peraturan perundang-undangan, tidak terdapat perbedaan persyaratan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota antara perempuan dan laki-laki sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 60 Undang-Undang 12 Tahun 2003 Tentang calon anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota harus memenuhi syarat dalam pencalonan.

- a. Warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia.
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
- g. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- h. Sehat jasmani dan rohani.
- i. Terdaftar sebagai pemilih.
- j. Bersedia bekerja penuh waktu.

- k. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil.
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik.
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
- n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu.
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan.
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Selain membicarakan persyaratan sebagai calon anggota DPRD juga perlu dijelaskan macam-macam alasan mereka tidak ikut serta dalam kegiatan politik, ketidakikutsertaan mereka ini disebabkan oleh:

1. Apati (masa bodoh), secara sederhana diartikan sebagai tidak punya minat atau perhatian terhadap orang lain, situasi atau gejala-gejala disekitarnya. Mengapa mereka memiliki sikap apatis. Paling tidak ada tiga alasan pokok untuk menerangkan adanya apatis.
  - a. Adanya konsekuensi yang ditanggung dari aktifitas politik. Hal ini dapat mengambil beberapa bentuk: individu dapat, merasa bahwa aktifitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupannya. Umpamanya: aktifitas politik yang ia ikuti dikuatirkan akan dapat mengancam eksistensi keluarganya, posisi sosialnya akan terganggu atau rusak dan lain sebagainya.
  - b. Adanya anggapan aktifis politik yang dilakukannya hanya akan sia-sia saja. Sebagai individu tunggal ia tidak mampu mempengaruhi iklim politik, ia merasa bahwa kekuatan politik selalu berada di luar kontrol

dirinya sehingga apapun yang dia lakukan dianggap hanya akan sia-sia saja.

- c. Kehidupan politik dianggap kurang begitu memuaskan, partisipasi politik dianggap sebagai hasil yang sama sekali tidak layak bagi pemenuhan kebutuhan pribadi kebutuhan materinya.
2. Sinisme, seperti halnya apati, meliputi kepasifan dan ketidakaktifan relatif, merupakan suatu sikap yang dapat diterapkan baik pada aktivitas maupun ketidakaktifan, secara politis sinisme menampilkan diri dalam bentuk, perasaan bahwa politik itu kotor, menjadi politis itu tidak dapat dipercaya dan lain sebagainya.
3. Alienasi politik, sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat dan kecenderungan berfikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa, yang dilakukan oleh orang lain untuk orang-orang lain, mengikuti sekumpulan aturan-aturan yang tidak adil. dianggapnyalah bahwa kegiatan politik yang dilakukan oleh penguasa hanya menguntungkan mereka saja, tetapi tidak bagi dirinya.
4. Anomie, perasaan kehilangan nilai dan ketiadaan arah, dalam mana individu mengalami perasaan ketidak efektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi dari pada tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.

**Menurut Rush dan Althoff (1983)** untuk dapat melihat sejauh mana keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik dapat dilihat dari hirarki partisipasi

politik yang dilakukannya. Hirarki partisipasi itu politik itu dapat dilihat. Sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan politik dan administratif
2. Mencari jabatan politik atau administratif
3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik
6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, kampanye dan sebagainya
8. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum
9. Pemberian suara (Voting).

#### **6. Partisipasi politik perempuan**

**Partisipasi** berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Berdasarkan isi surat-surat Kartini, ia juga mengatakan bahwa banyak dari impian Kartini sekarang telah menjadi realitas khususnya tentang pendidikan perempuan. Sesuatu yang sangat dekat di hatinya karena ia beranggapan kebodohan perempuan telah berpengaruh secara meluas pada kemajuan bangsanya. Meskipun benar bahwa hingga kini masih ada perempuan Indonesia yang buta huruf, namun usaha untuk menghilangkan kondisi tersebut telah menjadi perhatian nasional sejak Indonesia merdeka. Sejauh mana ini dapat dikaitkan dengan cita-cita Kartini memang dapat diinterpretasikan secara berbeda.

Namun yang nyata ialah bahwa Kartini telah ikut merangsang berkembangnya suatu iklim yang memungkinkan bahwa kini perempuan diberbagai lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk mengikuti berbagai jenis pendidikan dan keterampilan untuk keperluan perkembangan dirinya, maupun untuk menopang kehidupan ekonomi keluarganya. Sehingga memang benar bila dikatakan bahwa apa yang kini terbuka bagi perempuan sebelumnya tidak terbayangkan oleh Kartini bahwa hal tersebut dapat terjadi demikian cepatnya. Meskipun Kartini sejak semula sudah dengan penuh kepastian dapat menyatakan bahwa “ Perubahan itu pasti akan terjadi”. Ia menyatakannya berdasarkan pengamatannya yang kritis terhadap berbagai kejadian di dunia pada permulaan abad ke 20 (*de tijdsbeest, mijn helper en beschermer, liet overal zijn dreunende stappen hooren*. Iklim, ciri zaman, pembantu dan pelindungku, dimana-mana mendengarkan jejak-jejaknya). Suatu zaman yang ditandai oleh adanya perubahan mendasar diberbagai segi kehidupan, termasuk kedudukan perempuan di dalam masyarakat ).

**Menurut G. Ferraro, (1984).** Apa yang diperlukan bukan beberapa perempuan yang membuat sejarah, tetapi banyak perempuan yang ikut membuat kebijakan. (*Saparinah Sadli, 2010. 197*)

**Partisipasi perempuan** merupakan partisipasi yang dilakukan oleh para aktivis perempuan baik dipartai politik maupun orang kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya meningkatkan peran sekaligus meningkatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh para perempuan. (*Wordpress com, 2010*)

**Menurut Mulyana W. Kusumah (1996)**, partisipasi politik perempuan diartikan sebagai akses wanita pada penguasaan sumber daya politik. Ia membagi model partisipasi ini antara lain sebagai berikut : pertama, aspek ideologis yakni keyakinan, nilai, gagasan tentang hak-hak perempuan yang berkembang saat itu (*megawati : 1996. 22*)

Kedua, aspek organisasi dalam arti perkembangan peran politik organisasi-organisasi wanita, derajat kemandirian serta tingkat keterwakilannya dalam lembaga perwakilan rakyat. Ketiga, aspek konstitusional yaitu undang-undang serta kebijakan yang memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak wanita.

**Partisipasi perempuan** adalah suatu tindakan secara sadar dengan adanya keterlibatan mental dan emosi serta fisik seseorang atau kelompok masyarakat secara sadar dilakukan dalam usaha untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan menggunakan dan disertai tanggung jawab serta evaluasi. (*S.Darmadi, 2010, 44*).

**Partisipasi politik perempuan** diartikan sebagai keikutsertaan perempuan untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung dan tidak langsung ikut terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum ataupun mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Sugiarti (*dalam indriyati dkk, 2005 :21*)

Disamping itu, **partisipasi politik wanita** juga terkait dengan pertumbuhan negara dengan keterlibatannya ke dalam segenap aspek kehidupan serta keunggulannya untuk mempertahankan dominasi yang pada satu sisi

berlangsung dalam konteks pembangunan hubungan-hubungan kapitalistik, dan pada sisi lain diperkuat oleh konstruksi-konstruksi ideologi.

Pentingnya partisipasi politik bagi perempuan disebabkan masalah partisipasi sangat berkaitan langsung dengan masalah-masalah lain. (mackinnon dalam ( *To ward a feminist theory of the state: hal 215* ).

Partisipasi perempuan politik perempuan adalah bagian penting dalam proses demokrasi tersebut Menurut Indriyati dkk (2005:Viii), partisipasi perempuan tidak mengandung makna sebagai sesuatu yang istimewa atau swesuatu yang unik. Melainkan sebuah keharusan dan keperluan yang memungkinkan mereka untuk memperjuangkan hak-haknya melalui arena politik, dari sinilah slogan” *No democracy without women*”( *tidak ada demokrasi tanpa kaum perempuan*) memperoleh ruhnya yang nyata.

Dalam praktiknya ketiga macam aspek partisipasi politik tersebut tidak secara transparan dapat kita lihat dengan jelas. Hal ini disebabkan kebudayaan politik belum sepenuhnya menerima peran politik wanita secara sah dan alami khususnya di negara-negara berkembang.

**Menurut Nana Nurliana Soeyono, (1997).** Ada kenyataan pula bahwa pada masa lampau perempuan telah berperan aktif dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan bahkan militer (*Gaparinah, 2010. 205*).

Partisipasi politik wanita selama ini biasanya masih dikaitkan dengan sosok wanita itu pada orang-orang dibelakangnya. Sehingga kehadiran wanita dalam pentas politik itu masih berupa bayang-bayang yang seolah tidak terjadi dalam kenyataan. John Naisbitt dan Patricia Aburdene dalam bukunya *Megatren*

2000, secara gamblang memperlihatkan adanya gelombang perubahan yang menyebabkan hadirnya apa yang mereka sebut dasawarsa wanita. Contoh wanita yang telah memegang tampuk kekuasaan itu antara lain : Megawati Soekarno Putri.

**Megawati Soekarno Putri, (1996).** Secara sekilas memiliki pandangan dan pemikiran politik sebenarnya tidak begitu jauh dengan perjuangan yang pernah dilakukannya. Secara umum pandangan itu terdiri atas beberapa item yaitu:

1. Tentang kepentingan rakyat banyak
2. Soal demokrasi
3. Persatuan dan Kesatuan
4. Hak asasi manusia
5. Dwi fungsi ABRI
6. Kesenjangan sosial
7. Pembangunan Indonesia

**R.A Kartini dan Megawati** merupakan sosok pejuang perempuan tanah air yang mana mereka telah berjuang mengangkat harkat dan derajat perempuan agar bisa setara dengan laki-laki baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan bidang lainnya. Hingga sampai saat ini hak perempuan tersebut masih tetap diperjuangkan khususnya bidang politik.

Seiring dengan semakin luasnya wacana tentang pemberdayaan perempuan dan partisipasi perempuan telah membawa perubahan yang baru



terhadap kondisi perempuan yang selama ini termarginalkan oleh kepentingan laki-laki.

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia “. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara (tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin) mempunyai hak yang sama satu dengan yang lainnya untuk melakukan pekerjaan (sepanjang tidak dilarang) yang dijamin UUD.

Rumusan pasal 27 ayat 2 merupakan dasar Fundamental tentang perlindungan hak manusia dalam bidang pekerjaan untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. namun demikian satu hal yang masih sangat terasa mendukung adalah kultur masyarakat yang memandatkan kaum perempuan sebagai warga kelas dua yang berada di bawah dominasi kaum pria dengan menempatkan fungsi wanita sebagaimana dia memasak, melahirkan dan membesarkan anak.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana merealisasikan konsepsi persamaan hak itu dalam bentuk konkret, karena pada saat sekarang sudah menjadi gejala umum bahwa kaum perempuan memasuki bidang yang biasanya hanya di tangani bersama dan menempatkan kaum perempuan sebagai partner kerja kaum pria.

Ada beberapa hal yang mendasari mengapa kaum perempuan sudah banyak memasuki dunia kerja yakni:

1. Mereka mencari pekerjaan untuk menyalurkan hoby dan mengembangkan karya dan bakat.

2. Mereka mencari pekerjaan karena mempunyai kemampuan untuk dapat berprestasi dalam pembangunan karena ilmu yang mereka miliki.
3. Mereka merasa kesepian kalau berada di lingkungan rumah tangga.

Agar perempuan dapat menempatkan posisinya harus diberdayakan oleh karena itu UU. No. 8 Tahun 2008 perlunya di implementasikan supaya tidak terjadi lagi proses implementasi adalah tindakan-tindakan yang di lakukan baik oleh individu, pejabat, dan kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan. jadi dapat di simpulkan bahwa Implementasi adalah suatu kegiatan yang di maksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.

**Carl J. Friedrich,(1990)**, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil.

**R. H. Soutau, (1990)**, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

**Sigmund Neumann,(1990)**, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan– golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

**Menurut Nelson W. Polsby,(1990),** lembaga legislatif adalah suatu organisasi dengan anggota lebih dari satu (multi members) yang menggunakan metode negosiasi, dan pemilihan umum sebelum mengambil suatu keputusan dan bertanggung jawab kepada rakyat.

**A Sudiharjo, (1990).** Mengemukakan pendapatnya bahwa pemilu adalah sarana demokrasi yang paling penting ia merupakan perwujudan nyata keikutsertaan dalam kehidupan kenegaraan. hal tersebut disebabkan oleh karena rakyat atau warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dengan bebas wakil–wakilnya yang akan ikut menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. dengan melakukan pemilihan wakil–wakilnya secara bebas maka berarti bahwa rakyat sudah ikut serta terlibat dalam kehidupan kenegaraan.

Berbicara mengenai politik perempuan pada awal abad ke–20 perempuan secara umum berhasil memperoleh haknya untuk ikut ambil bagian di dunia politik secara resmi *Olympe de Gouges* saat itu mengatakan di paris commune tahun 1793 bahwa “ jika seorang perempuan berhak menaiki tangga , ia juga harus berhak untuk naik ke mimbar “.

Kuota partisipasi perempuan di parlemen sebesar 30 % sepertinya hanya isapan jempol belaka, karena parlemen masih didominasi oleh politisi pria, lembaga–lembaga tinggi negara pun masih dikuasi oleh kaum maskulin, belum lagi aparatur pemerintahan, masih amat langka wajah–wajah feminimnya.

Dalam menyikapi fenomena kegagalan ini, **Winarti ,(2004),**mencatat ada dua hal yang menyebabkan perjuangan perempuan di parlemen menjadi terhambat. Pertama, perempuan belum mampu membuat kerja sama konkret dan

berkelanjutan dalam mengangkat isu politik perempuan, seperti isu kuota 30% atau “perempuan pilih perempuan” Selama jender belum menjadi perspektif berpolitik lembaga politik atau organisasi kemasyarakatan secara luas, isu kuota 30% dan “perempuan pilih perempuan” dapat menjadi bumerang bagi perempuan ketika berbicara tentang kepentingan politik secara luas.

Kedua, perempuan belum mampu menunjukkan perhatiannya akan persoalan yang lebih luas di luar masalah perempuan, misalnya persoalan ekonomi nasional, hubungan internasional, hukum nasional, kepemimpinan nasional, otonomi daerah, dan masa depan bangsa. **Winarti, (2004)** menekankan perlunya proses sosialisasi kesadaran jender, khususnya terhadap lembaga politik dan institusi sosial yang ada dalam masyarakat. hal ini harus menjadi kerja berkelanjutan dan terencana selama beberapa tahun kedepan .kerja berkelanjutan dan terencana yang dimaksud adalah membangun kerja di luar momen politik..

Stereotif klasik mengenai perempuan dan kefemininan tidak mencantumkan gagasan kekuasaan, dan meskipun kondisi telah berubah, stereotif tersebut sulit dihilangkan. Gambaran klasik mengenai kefemininan identik dengan kepasrahan, kepatuhan, kesetiaan, kemanjaan, kekanak-kanakan, kesimpatikan, kehangatan, kelembutan, keramahan dan ketidak tegasan.

## **7. Partisipasi perempuan dalam daftar calon legislatif partai politik**

Secara keseluruhan, proporsi perempuan sebagai legislator sangat sedikit, pada pemilu 1999 pemilih yang berjenis kelamin perempuan mencapai 57% , namun jumlah wakil perempuan dalam parlemen (DPR-RI) hanya 9% . ini menunjukkan bahwa struktur budaya dan politik Indonesia belum berpihak pada

perempuan, pada pemilihan umum 1999 yang dinilai sudah adil dan jujur oleh beberapa pihak, ternyata jumlah perempuan di DPR/ MPR dan DPRD justru menurun dibanding hasil pemilihan umum sejak tahun 1977, 1982, 1987, 1992, yang bisa mencapai 11% sedangkan pemilihan umum 1999 tidak mencapai 10% sementara itu pada pemilihan 2009 jumlah calon legislatif yang mencalonkan diri juga masih rendah dibandingkan pada tahun 2004.

Dalam undang-undang No. 10 tahun 2008 pasal 8 ayat 1 butir D menyatakan bahwa persentase partisipasi perempuan dari setiap partai politik harus memenuhi kuota 30% dari setiap partai.

Didalam penetapan calon anggota legislatif disemua tingkat, mulai dari DPRD tingkat kabupaten/Kota, DPRD Propinsi dan DPR Pusat, setiap partai juga diwajibkan memenuhi kuota 30 % perempuan tersebut. Hal ini juga memperhitungkan nomor urut, yaitu, dari 3 orang calon harus terdapat 1 orang perempuan. Jadi umpamanya sebuah partai politik menetapkan calon dari sebuah dapil adalah 6 orang, maka minimal 2 orang adalah perempuan. Dan nomor urut yang diberikan kepada kaum perempuan ini haruslah mengikuti kaidah kuota 30 % tersebut. Salah satu dari urutan satu sampai tiga harus diisi oleh perempuan. (*Suryadi, 2007*).

## **8. Persepsi sosial dan masyarakat terhadap calon legislatif perempuan**

Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap caleg perempuan yaitu: Usia, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, pengalaman, motivasi, sedangkan faktor situasional, budaya patriarki, agama, kebijakan pemerintah, kebiasaan kelompok.

### 2.3. Kerangka Pikiran

Kerangka pemikiran ini adalah uraian tentang keterkaitan antara variabel yang diteliti, yaitu partisipasi perempuan sebagai calon legislatif pada partai politik peserta pemilu dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang relevan.

Berdasarkan konsep teoritis yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa, Partisipasi perempuan sebagai calon anggota legislatif dari partai politik dipengaruhi oleh kapabilitasnya yang dinilai melalui sistem pencalonan anggota legislatif yang berlangsung dalam partai politik serta persepsi masyarakat terhadap peran gender perempuan sebagai calon legislatif pada suatu partai politik.

Untuk menentukan faktor yang mempengaruhi Partisipasi perempuan sebagai calon legislatif pada partai politik peserta pemilu legislatif Kabupaten Pelalawan Tahun 2009, analisis dilakukan terhadap indikator-indikator yang meliputi, tingkat pendidikan formal, pengalaman organisasi, sistem rekrutmen, persepsi sosial dan agama serta persepsi budaya (kultural) masyarakat. Sedangkan dimensi dari variabel tersebut yaitu:

#### a. Persyaratan pencalonan

Dalam peraturan perundang-undangan, terdapat perbedaan persyaratan pencalonan sebagai calon anggota legislatif Tahun 2004 dengan tahun 2009 yaitu Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 16 huruf c tentang kelengkapan administrasi bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yakni surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tentang tidak tersangkut perkara

pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat. (*Batak pos online com 2009*).

Faktor yang dikatakan sebagai penghambat kaum perempuan untuk terlibat dalam bidang politik yang sekaligus sebagai penentu kurangnya perempuan dalam menduduki posisi penting dan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh aspek sosial agama
2. Tingkat pendidikan
3. Adat tradisi serta budaya
4. Pengalaman organisasi
5. Rekrutmen politik (*Yuni lestari 2008*)

Sedangkan faktor-faktor yang dikatakan mempengaruhi partisipasi perempuan dalam proses pencalonan meliputi, persepsi ataupun pandangan serta kepercayaan yang datang dari masyarakat itu sendiri yang merupakan tujuan dalam proses demokrasi serta persyaratan-persyaratan dalam proses pencalonan anggota legislatif yang harus dipenuhinya (*Rita 1995*).

indikator dari persyaratan pencalonan meliputi:

- Tingkat pendidikan formal

Pendidikan merupakan proses pembangkitan makna-makna yang esensial yang membimbing pelaksanaan hidup manusia melalui perluasan dan pendalaman makna-makna tadi (*Philip H. phenik 1964,6-8*)

Sedangkan yang dimaksud pendidikan formal menurutnya adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya

termasuk kedalamnya ialah kegiatan study yang berorientasi akademis dan umum program spesialisasi dan latihan professional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

- Pengalaman organisasi

Organisasi merupakan wadah yang tepat bagi perempuan untuk menyalurkan aspirasinya agar tujuan yang diinginkan tercapai.

**Robbin, S.P. (1986)** yang menyatakan organisasi adalah satuan sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relatif kontinu untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama.

Suatu sistem yang terdiri dari pola aktifitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang –ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. (*Gitosudarmo, 2008. 2*).

- Sistem rekrutmen

Sistem rekrutmen adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. (*Ramlan Surbakti, 1992, 118*).

Rekrutmen politik merupakan proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi masa yang melibatkan golongan-golongan tertentu seperti golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan dan sebagainya sehingga dapat dikatakan bahwa rekrutmen



politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai hal ini seperti yang ditegaskan oleh Mochtar Mas'oed (2000:29)

- Persepsi sosial dan agama

Menurut Riswandi (2007), Persepsi social dan agama adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita.

- Persepsi budaya

Persepsi budaya adalah pandangan dan pemikiran yang koheren tentang sesuatu yang dipelajari yang dibagi atau yang dipertukarkan oleh sekelompok orang untuk memahami kejadian atau gejala, tentang sikap mereka yang tepat terhadap sesuatu, gambaran suatu perilaku yang harus diterima oleh sesame atau yang berkaitan dengan dengan orang lain. (Nurhayati ismail, 2006, 75).

- b. Persepsi masyarakat

Persepsi masyarakat adalah suatu titik tolak pemikiran kolektivitas interaksi manusia yang terorganisasi kegiatannya terarah pada sejumlah tujuan yang sama, memiliki kecendrungan untuk memiliki keyakinan sikap dan bentuk tindakan yang sama. (Krech, Crutchfield, dan Ballachey:2006,75)

## **2.4. Defenisi Konsep dan Konsep operasional**

### **2.4.1 Defenisi Konsep**

Untuk memberikan kesamaan pandangan dan memudahkan analisa dan membatasi ruang lingkup penelitian perlu konsep operasional yang dianggap penting adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi berarti keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
2. Partai Politik peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu, menurut peraturan perundang-undangan.
3. Peran politik adalah partisipasi seseorang dalam dunia politik dengan menjadi anggota partai politik tertentu, sebagai calon legislatif maupun sebagai anggota legislatif mewakili suatu partai politik.
  - a. Peran politik perempuan adalah partisipasi kaum perempuan dalam dunia politik dengan menjadi anggota partai politik, sebagai calon legislatif maupun sebagai anggota legislatif mewakili suatu partai politik.
  - b. 30 persen kuota partisipasi perempuan adalah persentase jumlah minimal perempuan dalam keanggotaan suatu badan, baik dalam daftar calon parlemen, parlemen, anggota komisi parlemen, maupun pemerintah yang ditetapkan undang-undang.

### **2.4.2 Konsep Operasional:**

#### **a. Persyaratan Pencalonan Anggota Legislatif Partai Politik**

##### **1. Pendidikan formal**

Pendidikan formal yang dimaksud adalah tingkat pendidikan Yang dimiliki calon anggota legislatif dari kader perempuan mulai dari SLTA/Sederajat, Sarjana Muda/Diploma, Sarjana Strata Satu (S1) atau lebih.

Sedangkan menurutnya pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setarap dengannya termasuk ke dalamnya ialah kegiatan study yang berorientasi akademis dan umum program spesialisasi dan latihan professional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

##### **2. Pengalaman Organisasi**

Pengalaman organisasi adalah peran aktif kaum perempuan menjadi anggota maupun pengurus salah satu partai politik Minimal 5 tahun, dan pernah aktif menjadi anggota atau Pengurus organisasi kemasyarakatan lain sebelumnya.

##### **3. Sistem Rekrutmen**

Sistem rekrutmen adalah sistem yang diterapkan untuk penarikan calon anggota partai politik berdasarkan kualitas, kapabilitas, dan loyalitas sumber daya manusia baik melalui program pengkaderan

partai maupun penunjukan dari tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh.

b. Persepsi masyarakat.

Persepsi masyarakat yang dimaksud adalah pandangan atau pemahaman terhadap calon legislatif perempuan menurut Budaya (kultural), sistem nilai sosial dan agama serta anggapan yang berkembang di masyarakat setempat tentang peranan gender perempuan sebagai calon wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin jabatan-jabatan politik lain.

## 2.5 Teknik Pengukuran

Dalam pengukuran ini ada satu variabel yang akan diukur yaitu Partisipasi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yang terdiri dari lima indikator dimana untuk ukuran variabel ditetapkan sebagai berikut:

- Baik : Apabila lima Kriteria dapat dilaksanakan
- Kurang baik : Apabila hanya dua sampai tiga kriteria yang dilaksanakan
- Tidak baik : Apabila hanya satu kriteria yang dilaksanakan.

Untuk ukuran indikator variabel ditetapkan sebagai berikut:

1. Pendidikan Formal
2. Pengalaman Organisasi
3. Sistem Rekrutmen
4. Persepsi sosial dan agama terhadap calon legislatif perempuan
5. Persepsi budaya (kultural)
6. Persepsi masyarakat

### Tekhnik Pengukuran/Variabel;

- a. Terlaksana
- b. Kurang terlaksana
- c. Tak terlaksana

Untuk ukuran variabel ditetapkan sebagai berikut:

#### 1. Tingkat Pendidikan Formal, dapat dikatakan:

Baik : Apabila tingkat pendidikan formal perempuan yang merupakan Calon Legislatif partai politik pada umumnya Sarjana Strata Satu (S1) atau lebih.

Kurang baik : Apabila tingkat pendidikan formal perempuan yang merupakan Calon Legislatif partai politik pada umumnya Sarjana Muda Diploma.

Tidak baik : Apabila tingkat pendidikan formal perempuan yang merupakan calon legislatif partai politik pada umumnya adalah SLTA/Sederajat.

#### 2. Pengalaman Organisasi, dapat dikatakan:

Baik : Apabila kaum perempuan yang calon Legislatif partai politik pada umumnya mempunyai pengalaman organisasi lebih dari 5 (lima) tahun dengan menduduki posisi/jabatan puncak.

Kurang baik : Apabila kaum perempuan yang merupakan calon Legislatif partai politik pada umumnya mempunyai

pengalaman organisasi kurang dari 5 (lima) tahun dengan menduduki posisi/Jabatan menengah.

Tidak baik : Apabila kaum perempuan yang calon legislatif partai politik pada umumnya tidak mempunyai pengalaman organisasi sama sekali.

### 3. Sistem Rekrutmen, dapat dikatakan:

Baik : Apabila sistem rekrutmen yang diterapkan sepenuhnya dilaksanakan secara demokratis berdasarkan pada kualitas, kapabilitas, dan loyalitas, sumber daya manusia serta tanpa membedakan gender.

Kurang baik : Apabila sistem rekrutmen yang diterapkan masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara demokratis berdasarkan pada kualitas, kapabilitas, dan loyalitas sumber daya manusia serta tanpa membedakan gender

Tidak baik : Apabila sistem rekrutmen yang diterapkan tidak demokratis dan tidak berdasarkan pada kualitas, kapabilitas, dan loyalitas sumber daya manusia serta cenderung pada gender tertentu.

### 4. Persepsi sosial dan Agama terhadap calon legislatif perempuan, dapat dikatakan:

Baik : Apabila pemahaman dan pandangan sosial dan Agama maupun yang berkembang di tengah-tengah masyarakat setempat menganggap bahwa gender perempuan juga dapat berperan sebagai wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin dan jabatan politik lainnya.

Kurang baik : Apabila pemahaman dan pandangan sosial dan Agama maupun sistem nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat setempat masih menganggap bahwa gender perempuan kurang dapat berperan sebagai wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin dan jabatan politik lainnya.

Tidak baik : Apabila pemahaman dan pandangan sosial dan Agama Maupun sistem nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat setempat menganggap bahwa gender perempuan tidak dapat berperan sebagai wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin dan jabatan politik lainnya.

5. Persepsi budaya (kultural) terhadap calon legislatif perempuan, dikatakan:

Baik : Apabila budaya (kultural) maupun sistem nilai yang berkembang ditengah-tengah masyarakat setempat menganggap bahwa gender perempuan juga dapat

berperan sebagai wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin dan jabatan politik lainnya.

Kurang baik : Apabila budaya (kultural) maupun sistem nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat setempat masih menggap bahwa gender perempuan kurang dapat berperan sebagai wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin dan jabatan politik lainnya.

Tidak baik : Apabila budaya (kultural) maupun sistem nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat setempat menggap bahwa gender perempuan tidak dapat berperan sebagai wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin dan jabatan politik lainnya

## **2.6 Hipotesis**

Hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara dari hasil penelitian ini adalah: “ Diduga bahwa persyaratan pencalonan anggota legislatif partai politik dan persepsi masyarakat terhadap calon legislatif perempuan secara keseluruhan belum mencapai kategori baik, maka akan menyebabkan partisipasi perempuan sebagai calon legislatif pada partai politik peserta pemilu legislatif Kabupaten Pelalawan Tahun 2009 relatif rendah ”.

## **2.7 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah segala Sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.



Variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. (*Hatch dan Farhady, 1981*).

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut.

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
Partisipasi perempuan Dalam proses pencalonan anggota legislatif partai politik. ( <i>Mulyana w. kusuma:</i> <i>1996:22</i> )	a.Persyaratan pencalonan anggota legislatif partai politik b.Persepsi masyarakat terhadap calon legislatif perempuan	1.Pendidikan Formal 2.Pengalaman Organisasi 3.Sistem Rekrutment 4.Persepsi sosial dan agama 5. Persepsi budaya (cultural)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah survei dengan Cara deskriptif. **Menurut Singa Rimbun, (1997: 4).** Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan daftar pertanyaan sebagai alat pengumpul data yang pokok. sedangkan penelitian dengan cara deskriptif ini maksudnya untuk menggambarkan secara cermat fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

#### **3.1 Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Pelalawan meliputi calon anggota legislatif perempuan Kabupaten Pelalawan dan partai politik yang ada di Kabupaten Pelalawan.

#### **3.2 Populasi sampel**

##### **a. Populasi**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota calon legislatif perempuan partai politik yang ada di Kabupaten Pelalawan yakni berjumlah 59 orang dari 38 partai politik.

##### **b. Sampel**

Untuk mempermudah penelitian maka penulis mengambil sampel sebanyak 43 orang dari 18 partai politik, dimana ke 18 partai politik

tersebut tidak memenuhi syarat 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 1 undang-undang No. 10 tahun 2008 mengisyaratkan bahwa setiap partai politik yang memenuhi syarat harus memenuhi kuota partisipasi perempuan sebesar 30% .

**Tabel III.I**  
**JUMLAH PENYEBARAN SAMPEL DALAM PENELITIAN**

<b>NO</b>	<b>Nama Partai Politik</b>	<b>Sampel</b>
1.	Partai Buruh sosial demokrat	2
2.	Partai Merdeka	5
3.	Partai Nahdatul ummah indonesia	2
4.	Partai Patriot pancasila	3
5.	Partai Demokrasi indonesia perjuangan	5
6.	Partai Nasional Benteng kerakyatan	1
7.	Partai Golongan karya	7
8.	Partai Demokrasi kebangsaan	2
9.	Partai Matahari bangsa	3
10	PNI Marhaenisme	1
11	Partai Persatuan daerah	3
12	Partai Amanat nasional	3
13	Partai perjuangan indonesia baru	4
14	Partai Keadilan dan persatuan indonesia	4
15	Partai gerakan indonesia raya	2
16	Partai pengusaha dan kerja indonesia	3
17	Partai peduli rakyat indonesia	2
18	Partai hati nurani rakyat	7
<b>Jumlah</b>		<b>59</b>

Berdasarkan tabel di atas ada 18 partai yang dijadikan sampel dalam penelitian dimana 18 partai ini tidak memenuhi kuota 30% perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif , Dalam UU no 10 Tahun 2008 pasal 8 ayat

1 tidak ada penekanan terhadap partai politik yang tidak memenuhi maupun partai politik yang memenuhi kuota partisipasi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, artinya UU hanya sebatas mengingatkan bahwa dalam legislatif tersebut peran perempuan juga sangat di butuhkan.

### **3.3. Jenis Data**

Merupakan data yang di dapat dari individu atau responden secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara terpimpin ,dan data lain berupa studi literatur yang sangat mendukung penulisan proposal ini.

### **3.4 Teknik pengumpulan data**

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan :

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan didalam penelitian
2. Wawancara yaitu digunakan sebagai pelengkap dari teknik yang pertama, dimana besar kemungkinan data-data yang tidak terjaring dalam angket, maka digunakan teknik wawancara, teknik ini dengan berhadapan langsung dengan subjek penelitian, dimana wawancara ini untuk menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan objek yang diteliti.
3. Quisioner yaitu berupa pertanyaan angket terbuka dimana besar kemungkinan data yang tidak terjaring, digunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan jawabannya.

### **3.5 Analisa Data**

Setelah data yang diperlukan terkumpul ,maka data tersebut kemudian dikelompokkan menurut jenis dan macam data serta data yang ditambah dengan keterangan–keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian di analisa secara kualitatif. Dengan menganalisa data yang terkumpul dipergunakan metode deskriptif untuk menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai implementasi kebijaksanaan UU No.10 tahun 2008 pasal 8 ayat 1 butir D data tersebut disajikan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH KABUPATEN PELALAWAN**

#### **4.1 Sejarah Pelalawan**

Wilayah kerajaan Pelalawan yang sekarang menjadi Kabupaten Pelalawan, berawal dari Kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indera (sekitar tahun 1380 M). Beliau adalah bekas Orang Besar Kerajaan Temasik (Singapura) yang mendirikan kerajaan ini setelah Temasik dikalahkan oleh Majapahit dipenghujung abad XIV. Sedangkan Raja Temasik terakhir yang bernama Permaisura (Prameswara) mengundurkan dirinya ke Tanah Semenanjung, dan mendirikan kerajaan Melaka.

Maharaja Indera (1380-1420 M) membangun kerajaan Pekantua di Sungai Pekantua (anak sungai Kampar, sekarang termasuk Desa Tolam, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan) pada tempat bernama “Pematang Tuo” dan kerajaannya dinamakan “Pekantua”. Selain itu Maharaja Indera membangun candi yang bernama “Candi Hyang” di Bukit Tuo (lazim juga disebut Bukit Hyang), namun sekarang lebih dikenal dengan sebutan “Pematang Buluh” atau Pematang Lubuk Emas, sebagai tanda syukurnya dapat mendirikan kerajaan Pekantua.

Raja-raja Pekantua yang pernah memerintah setelah Maharaja Indera adalah Maharaja Pura (1420-1445 M), Maharaja Laka (1445-1460 M), Maharaja Sysya (1460-1460 M). Maharaja Jaya (1480-1505 M). Pekantua semakin berkembang, dan mulai dikenal sebagai bandar yang banyak menghasilkan barang-barang perdagangan masa lalu, terutama hasil hutannya. Berita ini sampai

pula ke Melaka yang sudah berkembang menjadi bandar penting di perairan Selat Melaka serta menguasai wilayah yang cukup luas, oleh karena itu Melaka bermaksud menguasai Pekantua, sekaligus mengokohkan kekuasaannya di Pesisir Timur Sumatera. Maka pada masa pemerintahan Sultan Mansyur Syah (1459-1477 M), dipimpin oleh Sri Nara Diraja, Melaka menyerang Pekantua, dan Pekantua dapat dikalahkan. Selanjutnya Sultan Masyur Syah mengangkat Munawar Syah (1505-1511 M) sebagai Raja Pekantua. Pada upacara penabalan Munawar Syah menjadi raja Pekantua, diumumkan bahwa Kerajaan Pekantua berubah nama menjadi “Kerajaan Pekantua Kampar” dan sejak itu kerajaan Pekantua Kampar sepenuhnya berada dalam naungan Melaka. Pada masa inilah Islam mulai berkembang di Kerajaan Pekantua Kampar.

Setelah Munawar Syah mangkat, diangkatlah puteranya Raja Abdullah, menjadi Raja Pekantua Kampar (1511-1515 M). Di Melaka, Sultan Mansyur Syah mangkat, digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah I, kemudian mangkat dan digantikan oleh Sultan Mahmud Syah I. Pada masalah inilah kerajaan Melaka diserang dan dikalahkan oleh Portugis (1511 M). Sultan Mahmud Syah I mengundurkan dirinya ke Muar, kemudian ke Bintan dan sekitar tahun 1526 M sampai ke Pekantua Kampar.

Raja Abdullah (1511-1515 M), raja Pekantua Kampar yang masih keluarga dekat Sultan Mahmud Syah I, yang turut membantu melawan Portugis akhirnya tertangkap dan dibuang ke Gowa. Oleh karena itulah ketika Sultan Mahmud Syah I sampai di Pekantua (1526 M) langsung dinobatkan menjadi Raja Pekantua Kampar (1526-1528 M) dan ketika beliau mangkat diberi gelar

“Marhum Kampar”. Makamnya terletak di Pekantua Kampar dan sudah berkali-kali dipugar oleh raja-raja Pelalawan. Pemugaran terakhir dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau dan pemerintah Negeri Melaka, Malasyia).

Sultan Mahmud Syah I setelah mangkat digantikan oleh puteranya dari isterinya Tun Fatimah, yang bernama Raja Ali, bergelar “Sultan Alauddin Riayat Syah II”. Tak lama kemudian, beliau meninggalkan Pekantua ke Tanah Semananjung, mendirikan negeri Kuala Johor, beliau dianggap pendiri Kerajaan Johor. Sebelum meninggalkan Pekanbatu, beliau menunjuk dan mengangkat Mangkubumi Pekantua (1530-1551 M)), yang bernama Tun Perkasa dengan gelar “Raja Muda Tun Perkasa”. Tun Hitam (1551-1575 M), Tun Megat (1575-1590 M).

Ketika dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Syah (cucu Sultan Alauddin Riayat Syah II, Raja Pekantua Kampar, kerajaan Johor telah berkembang pesat. Oleh karena itu Tun Megat, merasa sudah sepantasnya untuk mengirim utusan ke Johor untuk meminta salah seorang keturunan Sultan Alauddin Riayat Syah II kembali ke Pekantua Kampar untuk menjadi rajanya. Setelah mufakat dengan Orang-orang Besar Pekantua, maka dikirim utusan ke Johor, terdiri dari: Batin Muncak Rantau (Orang Besar Nilo dan Napuh), Datuk patih Jambuano (Orang Besar Delik dan Dayun), dan Raja Bilang Bungsu (Orang Besar Pesisir Kampar).

Sultan Abdul Jalil Syah mengabulkan permintaan Tun Megat, lalu mengirimkan salah seorang keluarga dekatnya yang bernama Raja Abdurrahman untuk menjadi Raja Pekantua. Sekitar tahun 1590 M, Raja Abdurrahman



dinobatkan menjadi raja Pekantua Kampar dengan gelar “Maharaja Dinda” (1550-1630 M). Terhadap Johor, kedudukannya tetaplah sebagai Raja Muda Johor. Sebab itu disebut juga “Raja Muda Johor di Pekantua Kampar”. Tun Megat yang sebelumnya berkedudukan sebagai Raja Muda, oleh Raja Abdurrahman dikukuhkan menjadi Mangkubumi, mewarisi jabatan kakeknya Tun Perkasa.

Raja Abdurrahman yang bergelar Maharaja Dinda itu amatlah mencintai laut. Beliau mendirikan tempat pembuatan kapal layar di Petatal dan Limbungan (sekarang berada dalam wilayah Sungai Ara, Kecamatan Bunut. Bandar dagang yang sebelumnya berpusat di Bandar Nasi, dipindahkan ke Telawa Kandis. Selanjutnya beliau memindahkan pula pusat kerajaan Pekantua Kampar dari Pekantua (Pematang Tuo) ke Bandar Tolam (sekarang menjadi Desa Tolam, Kecamatan Pelalawan).

Setelah mangkat, Maharaja Dinda digantikan oleh Puteranya Maharaja Lela I, yang bergelar Maharaja Lela Utama (1630-1650 M), Tak lama kemudian beliau mangkat, dan digantikan oleh puteranya Maharaja Lela Bangsawan (1650-1675 M), yang selanjutnya digantikan pula oleh puteranya Maharaja Lela Utama (1675-1686 M). Raja ini selanjutnya digantikan pula oleh puteranya Maharaja Wangsa Jaya (1686-1691 M). Pada masa pemerintahannya, Tanjung Negeri banyak diganggu oleh wabah penyakit yang banyak membawa korban jia rakyatnya, namun para pembesar belum mau memindahkan pusat kerajaan karena masih sangat baru. Akhirnya beliau mangkat dan digantikan oleh puteranya Maharaja Muda Lela (1691-1720 M), beliau segera memindahkan pusat kerajaan dari Tanjung Negeri karena dianggap sial akibat wabah penyakit menular yang menyebabkan banyaknya rakyat menjadi korban, termasuk ayahandanya sendiri.

Namun upaya itu belum berhasil, karena masing-masing Orang Besar Kerajaan memberikan pendapat yang berbeda. Pada masa pemerintahannya juga, perdagangan dengan Kuantan ditingkatkan melalui Sungai Nilo, setelah mangkat, beliau digantikan oleh puteranya Maharaja Dinda II (1720-1750 M). pada masa pemerintahannya diperoleh kesepakatan untuk memindahkan pusat kerajaan Pekantua Kampar ketempat yang oleh nenek moyangnya sendiri, yakni “Maharaja Lela Utama” pernah dilalaukan (ditandai, dicadangkan) untuk menjadi pusat kerajaan, yaitu di Sungai Rasau, salah satu anak Sungai Kampar jauh di hilir Sungai Nilo.

Sekitar tahun 1725 M, dilakukan upacara pemindahan pusat kerajaan dari Tanjung Negeri ke Sungai Rasau. Dalam upacara adat kerajaan itulah Maharaja Dinda II mengumumkan bahwa dengan kepindahan itu, maka nama kerajaan “PEKANTUA KAMPAR”, diganti menjadi kerajaan ‘PELALAWAN”, yang artinya tempat lalau-an atau tempat yang sudah dicadangkan. Sejak itu, maka nama kerajaan Pekantua tidak dipakai orang, digantikan dengan nama Pelalawan saja sampai kerajaan itu berakhir tahun 1946. Didalam upacara itu pula gelar beliau yang semua Maharaja Dinda II disempurnakan menjadi Maharaja Dinda Perkasa atau disebut Maharaja lela Dipati.

Setelah beliau mangkat, digantikan oleh puteranya Maharaja Lela Bungsu (1750-1775 M), yang membuat kerajaan Pelalawan semakin berkembang pesat, karena beliau membuka hubungan perdagangan dengan Indragiri, Jambi melalui sungai Kerumutan, Nilo dan Panduk. Perdagangan dengan Petapahan (melalui hulu sungai Rasau, Mempura, Kerinci). Perdagangann dengan Kampar Kanan dan Kampar Kiri (melalui sungai Kampar) dan beberapa daerah lainnya di pesisir

timur Sumatera. Untuk memudahkan tukar menukar barang dagangan, penduduk membuat gudang yang dibuat diatas air disebut bangsal rakit (bangsal rakit inilah yang kemudian berkembang menjadi rumah-rumah rakit, bahkan raja Pelalawan pun pernah membuat istana rakit, disamping istana darat).

Ramainya perdagangan di kawasan ini antara lain disebabkan oleh terjadinya kemelut di Johor. Setelah Sultan Mahmud Syah II (Marhum Mangkat Dijulang) mangkat akibat dibunuh oleh Megat Sri Rama, sehingga arus perdagangan beralih ke kawasan pesisir Sumatera bagian timur dan tengah, terutama di sungai-sungai besar seperti Kampar, Siak, Indragiri, dan Rokan. Dalam waktu itulah Pelalawan memanfaatkan bandar-bandar niaga untuk menjadi pusat perdagangan antar wilayah di pesisir timur dan tengah Sumatera.

Sultan Mahmud Syah II yang mangkat dibunuh oleh Laksemana Megat Sri Rama tidak berputera, maka penggantinya diangkat Bendahara Tun Habib menjadi Raja Johor yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Tak lama datang Raja Kecil Siak menuntut Tahta Johor, karena beliau mengaku sebagai putera Sultan Mahmud Syah II dengan istrinya yang bernama Encik Pong. (Catatan silsilah raja-raja Siak menyebutkan bahwa ketika Sultan Mahmud Syah II mangkat, Raja Kecil masih dalam kandungan bundanya, yang sengaja diungsikan keluar dari Johor. Dalam pelarian itulah beliau lahir, kemudian dibawa ke Jambi dan dibawa ke Pagarruyung.

Disanalah beliau dididik dan dibesarkan, sampai beliau turun kembali ke Johor melalui Sungai Siak untuk mengambil tahta Johor yang sudah diduduki oleh Sultan Abdul Jalil Riayat Syah itu. Mengenai Raja Kecil ini terdapat berbagai

versi, ada yang mengakuinya sebagai putera Sultan Mahmud dan ada yang menolaknya. Tetapi para pencatat sejarah dan silsilah dikerajaan Siak dan Pelalawan tetap mengakui bahwa beliau adalah putera Sultan Mahmud Syah II.

Raja kecil menduduki tahta Johor bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah. Tetapi kemudian terjadi pula pertikaian dengan iparnya, Raja Sulaiman, putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Pertikaian itu terus berlanjut dengan peperangan berkepanjangan. Raja Sulaiman akhirnya berhasil menduduki tahta Johor, dan bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah dengan bantuan lima orang putera bangsawan Bugis (1722-1760). Sedangkan Raja Kecil yang menduduki tahta Johor sebelumnya (1717-1722 M) mengundurkan dirinya ke Siak, kemudian membuat negeri di Buatan. Inilah awal berdirinya kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Kecil memerintah Siak 1722-1746 M).

Berlangsungnya kerusukan di Johor itu menyebabkan Pelalawan melepaskan dirinya dari ikatan Johor, apalagi berita yang sampai ke Pelalawan mengatakan, yang memerintah di Kerajaan Johor sekarang bukan lagi keturunan Sultan Alaudin Riayat Syah, yang dulunya menjadi raja Pekantua Kampar.

Pada masa Sultan Syarif Ali berkuasa di Siak (1784-1811 M), beliau menuntut agar Kerajaan Pelalawan mengakui Kerajaan Siak sebagai yang “Dipertuan”, karena beliau adalah pewaris Raja Kecil, putera Sultan Mahmud Syah II Johor. Pelalawan yang diperintah Maharaja Lela menolaknya. Maka pada tahun 1797 dan 1798, kerajaan Siak menyerang kerajaan Pelalawan. Serangan pertama yang dipimpin oleh Said Syahabuddin dapat dipatahkan kerajaan Pelalawan, namun serangan berikutnya yang dipimpin oleh Said Abdurrahman,

adik Sultan Syarif Ali dapat menaklukan kerajaan Pelalawan. Sultan Said Abdurrahman melakukan ikatan persaudaraan yang disebut “Begito” (pengakuan bersaudara dunia akhirat) dengan Maharaja Lela II, raja Pelalawan yang dikalahkannya, karena merasa sama-sama keturunan Johor, kemudian mengangkatnya menjadi Orang Besar Kerajaan Pelalawan dengan gelar Datuk Engku Raja Lela Putera. Said Abdurrahman kemudian dinobatkan menjadi Raja Pelalawan dengan gelar Syarif Abdurrahman Fakhruddin (1798-1822 M). Sejak itu kerajaan Pelalawan diperintah oleh raja-raja keturunan Said Abdurrahman, saudara kandung Syarif Ali, Sultan Siak, sampai kepada raja Pelalawan terakhir, raja-raja itu adalah:

1. Syarif Abdurrahman (1798 – 1822 M)
2. Syarif Hasyim (1822 – 1828 M)
3. Syarif Ismail (1828 – 1844 M)
4. Syarif Hamid (1844 – 1866 M)
5. Syarif Ja’afar (1866 – 1872 M)
6. Syarif Abubakar (1872 – 1886 M)
7. Tengku Sontol Said Ali (1886 – 1892 M)
8. Syarif Hasyim II (1892 – 1930 M)
9. Tengku Said Osman (Pemangku Sultan) (1892 – 1930 M)
10. Syarif Harun (Tengku Said Harun) (1941 – 1946 M)

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian

operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Luas Kabupaten Pelalawan 13.256,7 Km, yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa Pulau Besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul ( Penyalai ), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebuh, dan Pulau-pulau kecil lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan mencapai 280.197 jiwa dengan kepadatan penduduk 12 jiwa / km<sup>2</sup>. Di Kabupaten Pelalawan terdapat 12 Kecamatan, 106 Desa dan 12 Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggiran Sungai, ada juga di Perkebunan, dan Transmigrasi.

Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintas Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu

Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Propinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

#### **4.2 Sejarah DPRD Kabupaten Pelalawan**

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000.

Dengan terbentuknya Legislatif ( DPRD ) Kabupaten Pelalawan, maka pemilihan Bupati Pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 melalui Sidang Paripurna, terpilihlah pasangan T.Azmun Jaafar, SH dengan ABD.Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 2001 sampai dengan 2006. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan secara langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut terbentuk DPRD Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan No. KPTS. 508/VIII/2004 tentang Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2004 – 2009 yang diresmikan pengangkatannya.

Setahun setelah Pemilihan Anggota DPRD tepatnya tanggal 8 Februari 2006 diadakan pemilihan Bupati / Wakil Bupati secara langsung dipilih oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T.Azmun Jaafar dengan Rustam Effendi yang kemudian di kukuhkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131-14-94 Tahun 2006 tentang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Pelalawan Propinsi Riau.

### 4.3 Letak Geografis Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir Timur Pulau Sumatera, dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian Hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka. Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°25" LU dan 0°,20" LS serta antara 100°,42" ~ 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu di antaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten ini memiliki luas 13.256,70 Km<sup>2</sup> dan pada awal terbentuknya terdiri atas 4 kecamatan, yaitu kecamatan : Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri atas 12 wilayah kecamatan, yang meliputi 93 pemerintahan Desa dan 12 pemerintahan Kelurahan. 35 desa berada di pinggiran sungai, 8 desa berbatasan



dengan laut, 50 desa berada di kawasan perkebunan, PIR Trans dan pedalaman, 12 desa terdapat di kawasan kota sedang dan kecil. Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang pertama di Kabupaten Pelalawan pada bulan Februari 2008 menetapkan pasangan H.T Azmun Jaafar dan Drs H Rustam Efendi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan periode tahun 2008-2011.

#### **4.4 Visi dan Misi Kabupaten Pelalawan**

Visi kabupaten yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2006 – 2011 yaitu :

**“Terwujudnya Kabupaten Pelalawan Yang Maju Dan Sejahtera Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Oleh Pertanian Yang Unggul Dan Industri Yang Tangguh Dalam masyarakat yang beradab beriman Bertaqwa Dan Berbudaya Melayu Tahun 2030”**

##### **Misi Pertama**

Kelembagaan pemerintah yang diakui eksistensinya harus dapat berfungsi sebagai pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Aparat Sekretariat Daerah merupakan sumber daya yang potensial dalam bidang perencanaan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Integritas kelembagaan Sekretariat Daerah yang mantap dan dinamis dalam mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, serta lebih responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Setiap aparat diharapkan proaktif dalam melayani masyarakat dan bukan dilayani masyarakat.

##### **Misi Kedua**

Koordinasi dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi terhadap masalah, dengan cara mendefinisikan setiap masalah, menetapkan keputusan untuk memecahkan masalah, dan kemudian menetapkan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan masalah.

Apabila kegiatan ini dilaksanakan dengan baik akan bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mengkoordinasi perencanaan pembangunan.

Selain melaksanakan koordinasi, pemerintah Kabupaten Pelalawan juga dituntut memiliki bank data sebagai sumber informasi yang memungkinkannya untuk mengambil keputusan yang tepat.

#### **4.5 Struktur Wilayah**

Struktur wilayah merupakan dataran rendah dan bukit-bukit. Dataran rendah membentang kearah Timur dengan luas wilayah mencapai 93 persen dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.

Kabupaten Pelalawan tersebar disepanjang Sungai Kampar bagian hilir dengan karakter wilayah dataran rendah, termasuk pulau endapan yang terdapat di Kecamatan Kuala Kampar, dengan rasio ketinggian kurang dari 200 meter diatas permukaan laut. Daratannya dibelah oleh sungai besar; Sungai Kampar yang bermuara ke Selat Malaka, yang mana sungai tersebut dapat berfungsi sebagai sarana perhubungan, irigasi, dan sumber air minum. Pada beberapa tempat, daratannya dengan kondisi berbukit dan bergelombang terdiri dari orgonosol,

yaitu jenis tanah yang mengandung bahan organik. Kabupaten Pelalawan memiliki iklim tropis dengan suhu berkisar antara 22° C sampai 32° C dan kelembaban udara dengan rata-rata 80-88% dan curah hujan rata-rata 2.598 m<sup>2</sup>/tahun.

Kabupaten Pelalawan dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci dibagi menjadi 12 daerah Kecamatan, 106 Desa dan 13 daerah Kelurahan.

#### **4.6 Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan hasil proyeksi yang dilakukan oleh BPS Pelalawan tahun 2007 adalah 276.353 jiwa, yang terdiri dari. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam yakni 257.447 jiwa dan lainnya beragama Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.

Mata pencaharian cukup beragam, diantaranya sebagai, Pengusaha, Pedagang, Buruh, Petani, Nelayan, Tukang, dan lain-lain.

## **BAB V**

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Analisis Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pencalonan Anggota Legislatif di DPRD Kabupaten Pelalawan Tahun 2009**

Gambaran mengenai data yang diteliti yaitu menyangkut Analisis partisipasi perempuan dalam proses pencalonan anggota Legislatif di DPRD Kabupaten Pelalawan Tahun 2009. Penelitian dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada 43 orang dari 18 partai yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan Dalam Proses Pencalonan Anggota Legislatif.

##### **1. Pendidikan Formal**

Pendidikan Formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur bertingkat, berjenjang, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setarap dengannya termasuk kedalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum program spesialisasi dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus( *Philip H. phenik 964,6-8* ).

Jawaban responden tentang tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 Tanggapan responden tentang Pendidikan Formal yang dimiliki perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif kabupaten pelalawan tahun 2009

NO	PARTAI	PENDIDIKAN FORMAL						JUMLAH	
		S1		D3		SMA			
		F	P	F	P	F	P	N	P
1	Partai Buruh Sosial Demokrat	0	0%	1	50%	1	50%	2	100%
2	Partai Merdeka	1	20%	1	20%	3	60%	5	100%
3	Partai Nahdatul Ummah Indonesia	0	0%	1	50%	1	50%	2	100%
4	Partai Patriot Pancasila	0	0%	2	66,66%	1	66,66%	3	100%
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	20%	2	40%	2	40%	5	100%
6	Partai Nasional Benteng Kerakyatan	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%
7	Partai Golongan Karya	1	14,28%	2	28,57%	4	42,85%	7	100%
8	Partai Demokrasi Kebangsaan	1	50%	1	50%	0	-	2	100%
9	Partai Matahari Bangsa	2	66,66%	1	33,33%	0	66,66%	3	100%
10	PNI Marhenisme	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%
11	Partai Persatuan Daerah	0	0%	1	33,33%	2	33,33%	3	100%
12	Partai Amanat Nasional	1	33,33%	1	33,33%	1	66,66%	3	100%
13	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1	25%	1	33,33%	3	-	4	100%
14	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2	50%	1	25%	1	-	4	100%
15	Partai Gerindra	0	0%	1	50%	1	50%	2	100%
16	Partai Pengusaha dan Kerja Indonesia	1	33,33%	1	33,33%	2	-	3	100%
17	Partai Peduli Rakyat Indonesia	1	50%	1	0%	1	-	2	100%
18	Partai Hati Nurani Bangsa	1	14,28%	2	28,57%	4	57,14%	7	100%
Jumlah		13		20		29		59	100%

Berdasarkan hasil penelitian penulis ternyata pendidikan rata-rata perempuan yang mencalonkan diri di DPRD kabupaten pelalawan dalam proses pencalonan anggota legislatif adalah tamatan SMA dan pendidikan Diploma. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut pendidikan yang dimiliki oleh calon legislatif baik laki-laki maupun perempuan.

**Tabel 5.2 Persentase Pendidikan Yang Dimiliki Perempuan Sebagai Calon Ledislatif Tahun 2009**

Pendidikan yang dimiliki	Perempuan	Laki-laki
SLTA/MA/ sederajat	15,72	20,98
Ak/Diploma	2,00	2,11
Universitas	1,37	2,55

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden termasuk dalam kategori kurang baik, karena tingkat pendidikan formal perempuan yang merupakan calon legislatif partai politik pada umumnya tamatan SMA serta sarjana muda diploma sehingga dipandang tidak memenuhi persyaratan dalam proses pencalonan anggota legislatif.

Pada kenyataannya pendidikan adalah hal yang paling penting bagi seorang calon anggota legislatif, karena pendidikan akan menjadi acuan kalau seseorang itu mampu untuk memimpin dengan baik

## **2. Pengalaman Organisasi**

Organisasi merupakan wadah yang tepat bagi perempuan untuk menyalurkan aspirasinya agar tujuan yang diinginkan tercapai.

**Robbin, S.P. (1986)** yang menyatakan organisasi adalah satuan sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi

atas dasar yang relatif kontinu untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama.

Suatu sisitem yang terdiri dari pola aktifitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang –ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. (*Gitosudarmo,2008. 2*).

Jawaban responden dengan tingkat pengalaman organisasi kader harus minimal 5 tahun yang dimiliki kader partai dari kaum perempuan pada umumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.3    Tanggapan Responden Tentang Tingkat Pengalaman Organisasi Kader Harus Minimal 5 Tahun Yang Dimiliki Kader Partai Dari Kaum Perempuan Pada Umumnya**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	20	33,91%
2	Kurang Baik	22	37,28%
3	Tidak Baik	17	28,81%
	Jumlah	59	100.0%

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2011*

Berdasarkan jawaban responden pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden tentang tingkat pengalaman organisasi kader harus minimal 5 tahun yang dimiliki kader partai dari kaum perempuan pada umumnya dengan kategori jawaban baik sebanyak 20 orang atau 33,91%, kurang baik sebanyak 22 orang atau 37,28%, dan tidak baik sebanyak 17 orang atau 28,81%. Jadi rata-rata responden menyatakan **kurang baik** terhadap kaum perempuan yang merupakan calon Legislatif partai politik pada umumnya mempunyai pengalaman organisasi kurang dari 5 (lima) tahun dengan menduduki posisi/Jabatan menengah.

**Tabel 5.4    Tanggapan Responden Tentang Pengalaman Organisasi Yang Dimiliki Kader Partai Dari Kaum Perempuan Pada Umumnya**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	15	25,42%
2	Kurang Baik	25	42,37%
3	Tidak Baik	19	32,20%
	Jumlah	59	100.0%

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2011*

Berdasarkan jawaban responden pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden tentang pengalaman organisasi yang dimiliki kader partai dari kaum perempuan pada umumnya dengan kategori jawaban baik sebanyak 15 orang atau 25,42%, kurang baik sebanyak 25 orang atau 42,37%, dan tidak baik sebanyak 19 orang atau 32,30%. Jadi rata-rata responden menyatakan **kurang baik** terhadap pengalaman organisasi yang dimiliki kader partai dari kaum perempuan pada umumnya.

Rekapitulasi jawaban responden tentang pengalaman organisasi yang dimiliki kader partai dari kaum perempuan pada umumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 5.5    Tanggapan Responden Tentang Pengalaman Organisasi Yang Dimiliki Kader Partai Dari Kaum Perempuan**

No	Pengalaman Organisasi	Jawaban			Jumlah
		B	KB	TB	
1	tingkat pengalaman organisasi kader harus minimal 5 tahun yang dimiliki kader partai dari kaum perempuan pada umumnya	20	22	17	59
		33,91%	37,28%	27,90%	100.00%
2	pengalaman organisasi yang dimiliki kader partai dari kaum perempuan pada umumnya	15	25	19	59
		25,42%	42,37%	32,20%	100.00%
	Jumlah	45	37	36	118
	Rata-rata	14	22	23	59
	Persentase	23,72%	37,28%	38,99%	100.00%

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2011*

Berdasarkan jawaban responden pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden tentang pengalaman organisasi yang dimiliki kader partai dari kaum perempuan dengan kategori jawaban baik sebanyak 14 orang atau 23,72%, kurang baik sebanyak 22 orang atau 37,28%, dan tidak baik sebanyak 23 orang atau 38,99%. Jadi rata-rata responden menyatakan **kurang baik** terhadap kaum perempuan yang merupakan calon Legislatif partai politik pada umumnya mempunyai pengalaman organisasi kurang dari 5 (lima) tahun.

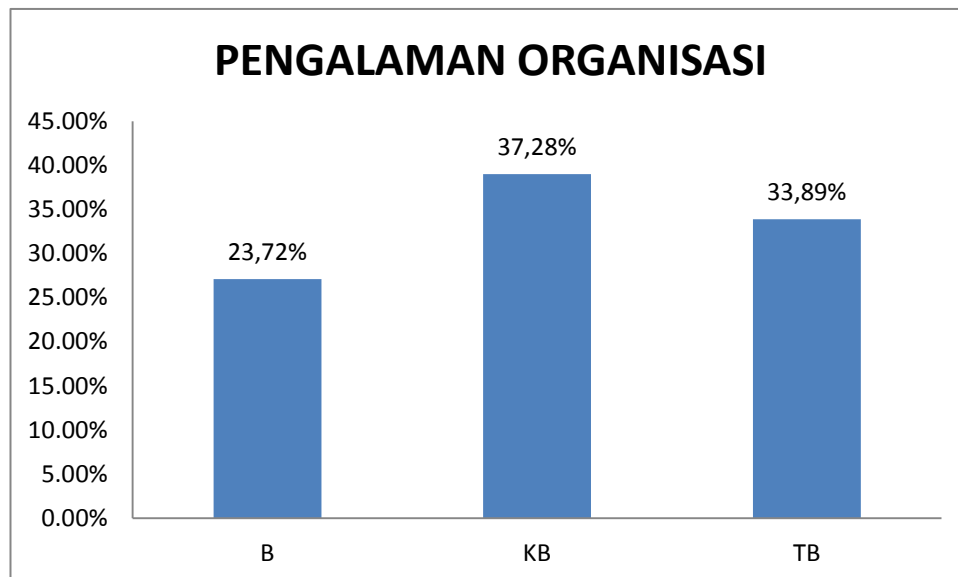
Ini diperkuat oleh wawancara yang dilakukan dengan anggota partai Hanura pada tanggal 21 Oktober 2011 Pada Pukul 09.00

Beliau menyatakan bahwa “pengalaman organisasi sangat penting bagi kader-kader baru, karena dengan pengalaman yang baik tentu akan mempengaruhi pengalaman kelangsungan partai dimasa depan

Kesimpulan dari uraian di atas menyatakan bahwa pengalaman organisasi sangat penting karena menyangkut kelangsungan suatu partai dimasa depan serta

kedewasaannya dalam memimpin Partai dan di dalam mengemban suatu amanah. Partai tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini :



*Sumber :Hasil Penelitian Lapangan 2011.*

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa pengalaman organisasi kaum perempuan yang merupakan calon Legislatif partai politik pada umumnya kurang baik yaitu sebanyak 37,28%, ini dikarenakan mempunyai pengalaman organisasi kurang dari 5 (lima) tahun.

Ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan sekretaris partai Gerakan indonesia raya pada tanggal 21 Oktober Pada Pukul 09.00

Beliau menyatakan bahwa :“pengalaman organisasi sangat minim, ini dapat dilihat kurangnya jaringan antar organisasi massa LSM dan partai politik untuk memperjuangkan aspirasi perempuan (networking) kelima, sistem pemilu yang menggunakan sistem refresentasi proporsional dengan daftar

tertutup. Ini membuat pemilih perempuan tidak tahu siapa yang mewakili perempuan di parlemen.

Kesimpulan dari uraian hasil wawancara diatas menyatakan Pengalaman organisasi kaum perempuan itu masih rendah dikarenakan kurangnya jaringan antar organisasi lain serta tidak bisa mencari dukungan yang lebih banyak agar bisa menduduki suatu jabatan politik kemudian juga sistem yang berkembang di dalam partai itu sendiri dimana sistem yang digunakan adalah sistem tertutup ini mengakibatkan perempuan itu tidak bisa ikut di dalam proses pencalonan.

Pengalaman organisasi bagi caleg perempuan itu merupakan suatu hal yang harus dimiliki sebab dengan adanya pengalaman organisasi maka calon tersebut akan paham dan mengerti menangani dunia politik.

Untuk menanggapi berbagai masalah yang dialami perempuan maka pengalaman organisasi perlu dimiliki oleh setiap individu, dengan adanya pengalaman organisasi otomatis akan menempa seseorang menjadi lebih baik terutama dari segi komunikasi. Hal tersebut juga merupakan modal untuk bekerja di kancah dunia politik sehingga memotivasi untuk keikutsertaan perempuan dalam meramaikan dunia politik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis calon legislatif yang mencalonkan diri dalam proses pencalonan terdiri dari berbagai propesi di antaranya: Buruh, pedagang, kontraktor, petani, mahasiswa, serta ibu rumah tangga.

### **3. Sistem Rekrutmen**

Sistem rekrutmen adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.(*Ramlan Surbakti, 1992, 118*).

Rekrutmen politik merupakan proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi masa yang melibatkan golongan-golongan tertentu seperti golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan dan sebagainya sehingga dapat dikatakan bahwa rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai hal ini seperti yang ditegaskan oleh Mochtar Mas' oed (2000:29)

Jawaban responden tentang sistem rekrutmen terhadap kader perempuan sebagai calon legislatif partai politik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.6    Tanggapan Responden Tentang Sistem Rekrutmen Terhadap Kader Perempuan Sebagai Calon Legislatif Partai Politik**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	11	18,64%
2	Kurang Baik	27	45,76%
3	Tidak Baik	21	35,60%
	Jumlah	59	100.0%

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2011*

Berdasarkan jawaban responden pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden tentang sistem rekrutmen terhadap kader perempuan sebagai calon legislatif partai politik dengan kategori jawaban baik sebanyak 11 orang atau 18,64%, kurang baik sebanyak 27 orang atau 45,76%. Jadi rata-rata responden menyatakan **kurang baik** terhadap sistem rekrutmen terhadap kader perempuan sebagai calon legislatif partai politik.

**Tabel 5.7    Tanggapan Responden Tentang Kualitas Calon Kader Terhadap Kader Perempuan Sebagai Calon Legislatif Partai Politik**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	9	15,25%
2	Kurang Baik	32	54,24%
3	Tidak Baik	18	30,51%
	Jumlah	59	100.0%

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2011*

Berdasarkan jawaban responden pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden tentang kualitas calon kader terhadap kader perempuan sebagai calon legislatif partai politik dengan kategori jawaban baik sebanyak 9 orang atau 15,25%, kurang baik sebanyak 32 orang atau 54,24%, dan tidak baik sebanyak 18 orang atau 30,51%. Jadi rata-rata responden menyatakan **kurang baik** terhadap kualitas calon kader terhadap kader perempuan sebagai calon legislatif partai politik.

Ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Anggota partai Golkar pada tanggal 21 Oktober 2011 Pada Pukul 09.00

menyatakan bahwa “system rekrutmen masih belum berjalan dengan baik karena system perekrutan menggunakan sistem kuota. Sistem kuota dimaksudkan untuk menjamin partisipasi perempuan dengan merekrutnya untuk memasuki posisi-posisi jabatan politik”.

Kesimpulan dari uraian diatas menyatakan bahwa sistem rekrutmennya masih bersifat asal-asalan dan sekedar untuk dipandang formal tetapi bukan didasarkan kemampuan dan seleksi yang ketat di dalam penjaringan tersebut.

Rekapitulasi jawaban responden tentang Sistem rekrutmen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.8    Tanggapan Responden Tentang Sistem Rekrutmen Terhadap Kader Perempuan**

No	Sistem Rekrutmen	Jawaban			Jumlah
		B	KB	TB	
1	sistem rekrutmen terhadap kader perempuan sebagai calon legislatif partai politik	11	27	21	59
		18,64%	45,76%	35,60%	100.00%
2	kualitas calon kader terhadap kader perempuan sebagai calon legislatif partai politik	9	32	18	59
		15,25%	54,24%	30,51%	100.00%
	Jumlah	43	36	39	118
	Rata-rata	16	23	20	59
	Persentase	38,99%	27,11%	33,90%	100.00%

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2011*

Berdasarkan jawaban responden pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden tentang sistem rekrutmen terhadap kader perempuan dengan kategori jawaban baik sebanyak 16 orang atau 38,99%, kurang baik sebanyak 23 orang atau 27,11%, dan tidak baik sebanyak 20 orang atau 33,90%. Jadi rata-rata responden menyatakan **kurang baik** terhadap sistem rekrutmen terhadap kader perempuan ini menunjukkan bahwa sistem rekrutmen yang diterapkan masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara demokratis berdasarkan pada kualitas, kapabilitas, dan loyalitas sumber daya manusia serta tanpa membedakan gender.

Rekrutmen bakal calon anggota DPRD kabupaten pelalawan dari partai demokrat dan PDS dalam beberapa hal menunjukkan adanya kesulitan untuk merekrut perempuan bakal calon legislatif untuk memenuhi 30% dalam DCT di

kedua partai tersebut disebabkan oleh berbagai alasan antara lain, pertama, kedua partai tersebut merupakan partai baru dimana pengkaderan terhadap kader perempuan belum berjalan seperti pada partai-partai yang telah lebih dulu berdiri.

Alasan kedua, dalam kepengurusan di tingkat propinsi, kedua partai tersebut memang mempunyai biro atau bidang kewanitaan. Tetapi di kedua partai tersebut keberadaan bidang kewanitaan hanya di atas kertas tidak ada aktifitas dari unit tersebut. Calon legislatif perempuan yang terdaftar pun hanya sekali datang ke kantor partai untuk menyerahkan dokumen pendaftaran.

DPW PDS proses pencalonan perempuan bakal calon legislatif tidak menjadi hal yang luar biasa, pencalonan berjalan biasa-biasa saja. Baik calon laki-laki maupun perempuan tidak terlalu bersikeras. Hal ini karena sebagai partai kecil, harapan untuk terpilih tidak besar. Sementara di partai demokrat, proses pencalonan bakal calon legislatif diwarnai dengan banyak kepentingan dan penyimpangan oleh para elit partai. Sebagai partai baru namun potensial mendulang banyak suara membuat oligarki-oligarki partai bermanuver. Sementara diluar lingkaran elit partai sarat dengan permainan uang.

Pengakuan kedua partai yang sulit mencari perempuan bakal calon legislatif menunjukkan bahwa di lingkaran partai tersebut tidak ada atau kurang ada perempuan yang berkualitas yang berkiprah di partai. Apalagi dibandingkan dengan kenyataan banyaknya perempuan yang berkualitas di luar partai seperti LSM dan ormas. Hal ini karena pengkaderan di partai tidak berjalan. Selain itu proses pencalonan juga tidak dilakukan secara terbuka dan demokratis. Oligarki partai yang banyak menentukan dalam proses pencalonan.

Putusan Mk No 22-24 / PUU-VI/2008 yang membatalkan pasal 214 UU No.10 tahun 2008 tentang pemilu yang menghapuskan system nomor dalam penentuan anggota legislatif, dan menggantinya dengan mekanisme suara terbanyak semakin mempersempit peluang perempuan bakal calon legislatif untuk duduk dalam DPRD , sehingga keterwakilan perempuan dalam DPRD berkurang dan tidak memenuhi kuota yang di tentukan. Partisipasi perempuan sebanyak 30% dengan menggunakan sistem zig-zag method tidak dapat terealisasi dengan baik. Sehingga calon legislatif perempuan harus bekerja keras untuk memperoleh suara yang signifikan dalam pemilu legislatif. Hal ini telah merusak affirmative action yang seharusnya diberikan kepada perempuan calon legislatif.

Perolehan kursi perempuan secara keseluruhan anggota DPRD terpilih sebesar 15%, berarti bahwa keberadaan perempuan di DPRD Kabupaten Pelalawan belum terwakili secara proporsional. Jumlah pemilih perempuan yang diperkirakan dari DPT di kabupaten pelalawan belum mencerminkan bahwa perempuan diwakili perempuan. Akibatnya tidak diwakili secara penuh, hal ini akan mengakibatkan bahwa pemahaman akan kebutuhan dan kepentingan perempuan di kabupaten pelalawan sedikit banyak akan terabaikan pada periode yang akan datang.

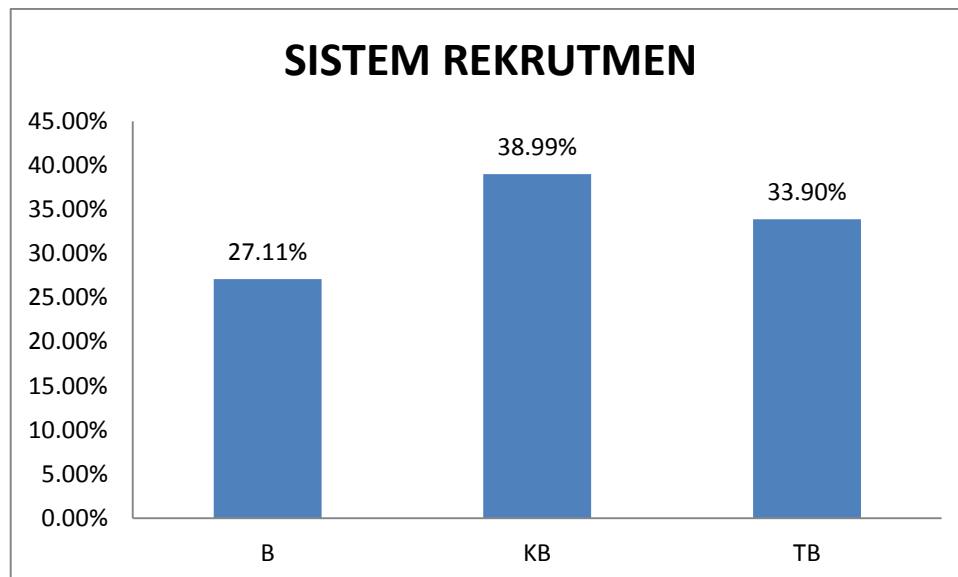
Proses perekrutan sering dilakukan melalui saluran informal melalui lembaga-lembaga modern seperti partai politik namun masih mencakup relasi-relasi informal, kekeluargaan dan relasi-relasi yang menonjol dan berkuasa.

Disamping itu partai politik dikuasai oleh sekelompok kecil elit partai sehingga rekrutmen yang dilakukan partai menggunakan relasi-relasi informal



kekeluargaan dan relasi-relasi etnis dari elit partai sehingga terjadi nepotisme, dan kolusi, oleh elit partai.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini :



*Sumber :Hasil Penelitian Lapangan 2011*

Dari gambar diagram diatas dapat dilihat bahwa sistem rekrutmen masih kurang baik ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menyatakan **kurang baik** sebanyak 27,11% ini menunjukkan bahwa sistem rekrutmen yang diterapkan masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara demokratis.

Ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan anggota partai. Demokrasi indonesia perjuangan pada tanggal 21 Oktober 2011 Pada Pukul 09.00

Beliau menyatakan bahwa “kualitas calon kader masih jauh dari harapan, karena minimnya peran politik perempuan tersebut, baik dalam partai politik, dewan perwakilan maupun pemerintahan menjadi tidak proporsional, mengingat relatif besarnya persentase penduduk maupun jumlah pemilih perempuan yang ada di indonesia. Dengan demikian, tercapainya partisipasi perempuan yang proporsional selain akan mengembangkan peran dan

partisipasi politik perempuan juga akan mendukung tercapainya hasil pembangunan”.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah Kualitas calon kader perempuan di kabupaten Pelalawan masih belum terlalu bagus diakibatkan minimnya peran perempuan itu sendiri dalam berbagai hal termasuk lembaga Legislatif, sedikit banyak pemilih perempuan ikut mempengaruhi di dalam pengambilan kebijakan.

#### 4. Persepsi Sosial

Persepsi social dan agama adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita.

Persepsi yakni proses internal dengan mana manusia memilih, dan mengevaluasi, mengorganisasikan, dan menafsirkan ransangan dari sekitarnya,(Mulyana, 1999: 49)

Jawaban responden tentang persepsi sosial dan agama terhadap calon legislatif perempuan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.9 Tanggapan Masyarakat Tentang Persepsi Sosial Dan Agama Terhadap Calon Legislatif Perempuan**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	16	27,12%
2	Kurang Baik	25	42,38%
3	Tidak Baik	18	30,50%
	Jumlah	59	100.0%

*Sumber : Hasil penelitian Lapangan 2011*

Berdasarkan jawaban responden pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden tentang persepsi sosial dan agama terhadap calon legislatif perempuan dengan kategori jawaban baik sebanyak 16 orang atau 27,12%, kurang baik sebanyak 25 orang atau 42,38%, dan tidak baik sebanyak 18

orang atau 30,50%. Jadi rata-rata responden menyatakan **kurang baik** terhadap persepsi sosial dan agama terhadap calon legislatif perempuan.

Kemudian jawaban responden tentang kebiasaan calon kader terhadap lingkungan sekitar terhadap calon legislatif perempuan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.10 Tanggapan Responden Tentang Kebiasaan Calon Kader Terhadap Lingkungan Sekitar Terhadap Calon Legislatif Perempuan**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	4	6,77%
2	Kurang Baik	45	76,28%
3	Tidak Baik	10	16,95%
	Jumlah	59	100.0%

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2011*

Berdasarkan jawaban responden pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden tentang kebiasaan calon kader terhadap lingkungan sekitar terhadap calon legislatif perempuan dengan kategori jawaban baik sebanyak 4 orang atau 6,77%, kurang baik sebanyak 45 orang atau 76,28%, dan tidak baik sebanyak 10 orang atau 16,95%. Jadi rata-rata responden menyatakan kurang baik terhadap kebiasaan calon kader terhadap lingkungan sekitar terhadap calon legislatif perempuan.ss

Kemudian jawaban responden pada persepsi sosial calon kader perempuan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

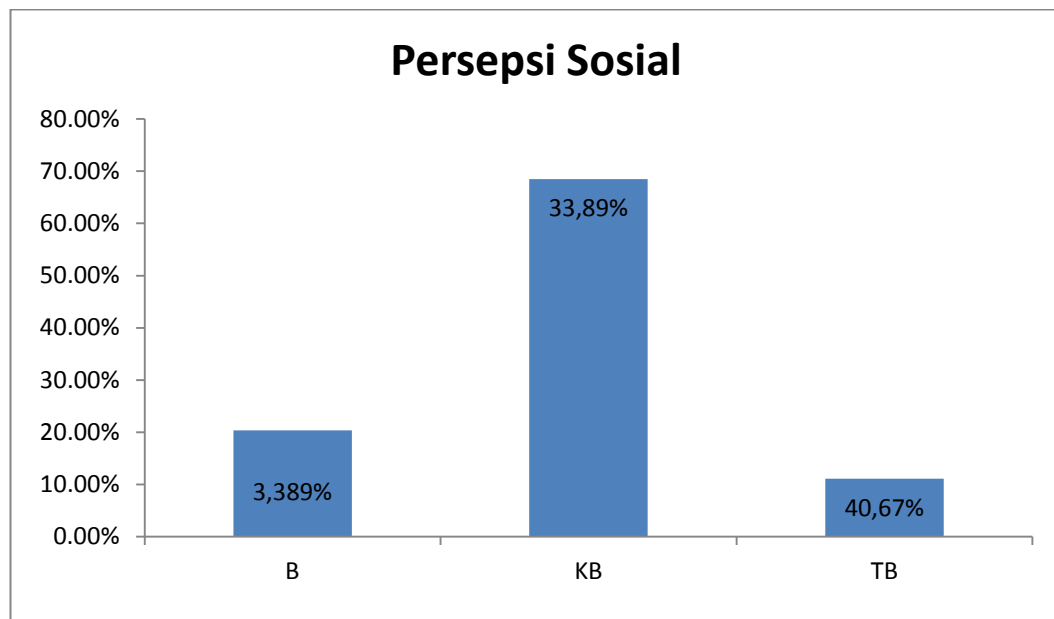
**Tabel 5.11 Tanggapan Responden Tentang Persepsi Sosial Calon Kader Perempuan**

No	Persepsi Sosial	Jawaban			Jumlah
		B	KB	TB	
1	persepsi sosial dan agama terhadap calon legislatif perempuan	16	25	18	59
		27,12%	42,38%	30,50%	100.00%
2	kebiasaan calon kader terhadap lingkungan sekitar terhadap calon legislatif perempuan	4	45	10	59
		6,77%	76,28%	16,95%	100.00%
	Jumlah	61	20	35	116
	Rata-rata	2	33	24	59
	Persentase	3,389%	33,89%	40,67%	100.00%

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2011*

Berdasarkan jawaban responden pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden tentang persepsi sosial calon kader perempuan dengan kategori jawaban baik sebanyak 2 orang atau 3,389%, kurang baik sebanyak 33 orang atau 33,89%, dan tidak baik sebanyak 24 orang atau 40,67%. Jadi rata-rata responden menyatakan **kurang baik** terhadap persepsi sosial calon kader perempuan karena pemahaman dan pandangan sosial dan Agama maupun sistem nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat setempat masih menganggap bahwa gender perempuan kurang dapat berperan sebagai wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin dan jabatan politik lainnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini :



*Sumber :Hasil Penelitian Lapangan 2011*

Dari diagram diatas terlihat bahwa persepsi social calon kader dari perempuan masih kurang baik ini dilihat dari jawaban responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 33,89%.ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat masih menganggap bahwa gender perempuan kurang dapat berperan sebagai wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin dan jabatan politik lainnya

Ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan bidang pendidikan partai Bintang Reformasi pada tanggal 21 Oktober 2011 Pada pukul 09.00

menyatakan bahwa “Reformasi yang dialami bangsa Indonesia 1998 membawa perubahan pada system politik terutama sistem pemilu. Perubahan ini membuka peluang bagi setiap elemen bangsa untuk terlibat didalamnya. Menuju kehidupan demokrasi yang lebih baik. Bagi kaum perempuan di Indonesia. Perubahan system politik itu juga memberi harapan bagi mereka untuk dapat memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata ”.

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa Reformasi yang bergulir saat ini tidak lagi mengekang kaum perempuan dalam berbagai hal bahkan memberikan perempuan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memasuki berbagai bidang pekerjaan termasuk bidang politik yang tujuannya untuk menuju demokrasi yang lebih baik sehingga mereka kaum perempuan dapat menyalurkan aspirasinya dengan sebaik baiknya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat yang di anggap mewakili masyarakat setempat menyatakan pandangannya kepada calon legislatif perempuan yang terjun kedunia politik beliau menyatakan.

Pemimpin perempuan itu lebih jujur, peduli, kreatif, aktif, berani dan punya hati nurani dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Kelebihan perempuan itu lebih memiliki empati terhadap publik, karena perempuan itu merasakan langsung kehidupan sehari-hari.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat yang mengetahui informasi tentang kepemimpinan perempuan tidak memandang jelek kepemimpinan perempuan karena menilai kepemimpinan itu dari sisi positif yang melihat perempuan sebagai suatu sosok yang memiliki sifat keibuan. Bersifat lemah lembut dibandingkan laki-laki yang cenderung selalu menggunakan akalnya dalam mengambil keputusan.

Tetapi pandangan positif tersebut tidak sesuai dengan penilaian masyarakat baik terhadap kinerja legislatif secara keseluruhan, maupun kepada anggota legislatif perempuan, Anggota legislatif perempuan di anggap gagal

mengaspirasikan kepentingan masyarakat, karena tidak mampu mengubah kondisi sosial ekonomi.

## 5. Persepsi Budaya

Persepsi budaya adalah pandangan dan pemikiran yang koheren tentang sesuatu yang dipelajari yang dibagi atau yang dipertukarkan oleh sekelompok orang untuk memahami kejadian atau gejala, tentang sikap mereka yang tepat terhadap sesuatu, gambaran suatu perilaku yang harus diterima oleh sesama atau yang berkaitan dengan dengan orang lain.

Jawaban responden tentang persepsi budaya (kultural) terhadap calon legislatif perempuan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.12 Tanggapan Responden Tentang Persepsi Budaya (Kultural) Terhadap Calon Legislatif Perempuan**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	13	22,04%
2	Kurang Baik	29	49,16%
3	Tidak Baik	17	28,80%
	Jumlah	59	100.0%

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2011*

Berdasarkan jawaban responden pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden dengan kategori jawaban baik sebanyak 13 orang atau 22,04%, kurang baik seba persepsi budaya (kultural) terhadap calon legislatif perempuan sebanyak 29 orang atau 49,16%, dan tidak baik sebanyak 17 orang atau 28,80%. Jadi rata-rata responden menyatakan kurang baik terhadap persepsi budaya (kultural) terhadap calon legislatif perempuan.

Kemudian jawaban responden tentang sejauh mana persepsi budaya legislatif perempuan dalam suatu partai politik dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 5.13 Tanggapan Responden Tentang Sejauh mana Persepsi Budaya Legislatif Perempuan Dalam Suatu Partai Politik**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	5	8,474%
2	Kurang Baik	28	47,45%
3	Tidak Baik	26	44,06%
	Jumlah	59	100.0%

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2011*

Berdasarkan jawaban responden masyarakat pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden tentang sejauhmana persepsi budaya legislatif perempuan dalam suatu partai politik dengan kategori jawaban baik sebanyak 5 orang atau 8,474%, dan kurang baik sebanyak 28 orang 47,45%,. Jadi rata-rata responden menyatakan **kurang baik** terhadap sejauhmana persepsi budaya legislatif perempuan dalam suatu partai politik.

Kemudian jawaban responden tentang persepsi budaya terhadap calon kader perempuan dapat dilihat pada tabel berikut ini,

**Tabel 5.14 Tanggapan Responden Tentang Persepsi Budaya Terhadap Calon Kader Perempuan**

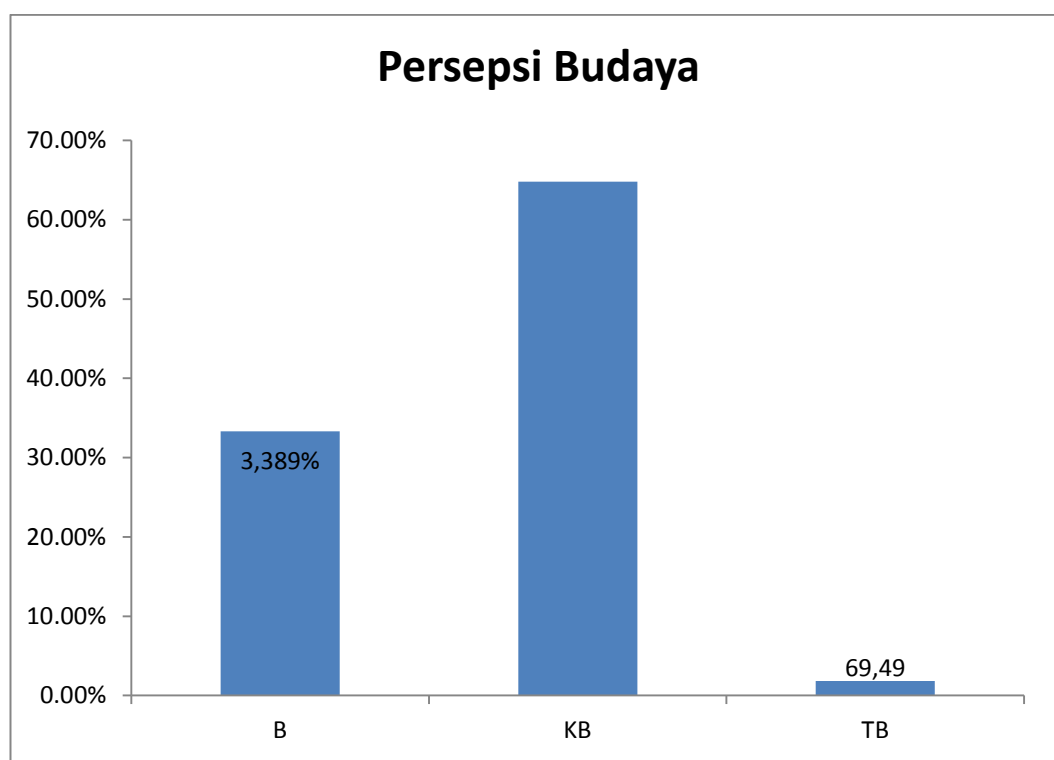
No	Persepsi Budaya	Jawaban			Jumlah
		B	KB	TB	
1	persepsi budaya (kultural) terhadap calon legislatif perempuan	13	29	17	59
		22,04%	49,16%	28,80%	100.00%
2	persepsi budaya terhadap calon kader perempuan	5	28	26	59
		8,474%	47,45%	44,06%	100.00%
	Jumlah	57	43	18	118
	Rata-rata	2	16	41	59
	Persentase	3,389%	27,12%	69,49%	100.00%



*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2011*

Berdasarkan jawaban responden pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden tentang persepsi budaya terhadap calon kader perempuan dengan kategori jawaban baik sebanyak 2 orang atau 3,389%, kurang baik sebanyak 16 orang atau 27,12%, dan tidak baik sebanyak 41 orang atau 69,49%. Jadi rata-rata responden menyatakan **kurang baik** terhadap persepsi budaya terhadap calon kader perempuan ini menunjukkan budaya (kultural) maupun sistem nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat setempat masih menganggap bahwa gender perempuan kurang dapat berperan sebagai wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin dan jabatan politik lainnya..

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini :



*Sumber :Hasil Penelitian Lapangan 2011*

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa rata-rata responden menyatakan kurang baik terhadap persepsi budaya calon kader perempuan yaitu sebanyak 27,12%. ini menunjukkan bahwa sistem nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat setempat masih menganggap bahwa gender perempuan kurang dapat berperan sebagai wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin dan jabatan politik lainnya.

Ini diperkuat oleh hasil Wawancara dengan bidang kaderisasi partai Keadilan Sejahtera 21 Oktober 2011 Pada Pukul 09.00

Beliau menyatakan bahwa “faktor-faktor keluarga seringkali menghambat gerak perempuan dalam berpolitik, izin dari pasangan seringkali menjadi hambatan dari pasangan dalam aktifitas politik perempuan. Ketujuh, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan”.

Sistem patriarkat yang masih berkembang di masyarakat awam yang berpendapat bahwa kedudukan perempuan dibawah laki-laki yang selalu memandang kaum perempuan tidak diperbolehkan memimpin suatu negara yang selalu membelenggu kaum perempuan sehingga membuat perempuan selalu dipandang sebagai objek.akibatnya aspirasi perempuan di tingkat legislatif tidak tersampaikan.

Upaya untuk mengatasi bentuk dominasi patriarkat ini yaitu, mengupayakan gerakan perempuan selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang budaya patriarkat yang masih membelenggu, kemudian gerakan perempuan setara dengan laki-laki dalam hal karir menjadi keharusan untuk dilakukan,ketiga menyadarkan bahwa laki-laki juga bertanggung jawab

untuk mengasuh anak-anak, mereka menemani adalah kewajiban bersama, keempat, aktivis perempuan mesti menggali lagi komitmen yang sedari awal telah disadari konsekuensinya.

Kesimpulan dari uraian diatas yaitu” Keluarga dan pasangan sering menjadi kendala di dalam berpolitik mengingat Perempuan merupakan manusia kelas kedua yang tugasnya mengasuh anak padahal kualitas perempuan lebih baik dari laki-laki dikarenakan di dalam memimpin maupun dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian pendapat yang berkembang di tengah masyarakat yang memandang perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi sehingga mengakibatkan kaum perempuan itu miskin dan termarginalkan.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yang secara ringkas disajikan sebagai berikut :

1. Adapun faktor yang menyebabkan relatif rendahnya perempuan berpartisipasi dalam pencalonan yaitu rendahnya pendidikan Formal yang dimiliki perempuan sebagai calon legislatif, Padahal pendidikan suatu hal yang amat penting bagi seorang pemimpin perempuan karena dalam hal kepemimpinan itu tidak saja dinilai dari pengalaman akan tetapi juga dilihat dari pendidikan yang dimiliki seseorang.
2. Faktor yang kedua yang menyebabkan relatif rendahnya perempuan berpartisipasi dalam pencalonan anggota legislatif yaitu pengalaman organisasi dimana pengalaman organisasi yang dimiliki kaum perempuan tersebut masih minim, dalam kenyataannya pengalaman organisasi adalah suatu bekal bagi seseorang untuk memimpin agar ia bias menempa dirinya dalam hal kepemimpinan.
3. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh kaum perempuan itu sendiri dalam berpartisipasi dalam pencalonan yaitu persepsi sosial yang berkembang di masyarakat yang memandang perempuan kurang dapat berperan sebagai wakil rakyat di parlemen akan tetapi tidak semua pandangan masyarakat itu buruk terhadap pemimpin perempuan, yang

hanya dijadikan sebatas objek belaka. perempuan juga memiliki kedudukan sejajar dengan laki-laki.

4. Kendala yang kedua yaitu persepsi budaya yang berkembang di tengah masyarakat dimana perempuan dipandang sebagai manusia kelas kedua yang kedudukannya dibawah laki-laki ini dibuktikan dengan masih kentalnya asas patriakat yang berkembang ditengah masyarakat yang berpandangan perempuan itu hanya sebatas objek dalam kehidupan sehari-hari karena kurang dapat berperan di lembaga parlemen atau jabatan politik lainnya.
5. Terbukti bahwa persyaratan pencalonan anggota legislatif partai politik dan persepsi masyarakat terhadap calon legislatif perempuan secara keseluruhan belum mencapai kategori baik, maka akan menyebabkan partisipasi perempuan sebagai calon legislatif pada partai politik peserta pemilu legislatif Kabupaten Pelalawan Tahun 2009 relatif rendah
6. Diharapkan sistem rekrutmen lebih memperhatikan pendidikan, dari kualitas calon legislatif perempuan sebagai peserta pemilu legislatif Kabupaten Pelalawan.
7. Tidak tercapainya partisipasi perempuan sebesar 30% di DPRD kabupaten pelalawan disebabkan oleh beberapa faktor yuridis dan tekhnis. Dilihat dari aspek yuridis partisipasi perempuan hanya diatur sebatas pada pencalonan saja sehingga tidak menjamin kuota 30% partisipasi perempuan.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan manfaat yang dirasakan penulis maka penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada partai partai yang ikut berkompetisi agar lebih memperhatikan kaum perempuan dengan lebih meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pencalonan dengan cara mengikut sertakan perempuan sebesar 30%
2. Partai politik lebih memperhatikan pendidikan formal maupun pendidikan politik serta pengalaman organisasi kaum perempuan itu sendiri didalam proses penyeleksian pencalonan anggota legislatif kemudian sistem rekrutmen yang ada tidak merugikan kaum perempuan khususnya.
3. Partai politik sebaiknya memenuhi sistem undang-undang yang sudah ditetapkan dengan penuh kesungguhan, bukan sekedar memenuhi kewajiban, sehingga perempuan yang dijadikan calon legislatif dari partai tersebut bukan hanya 'sekedar' calon. Selain itu, partai politik sebaiknya melakukan fungsi rekrutmen, sosialisasi dan pendidikan politik yang sesungguhnya, terutama bagi kaum perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan minat perempuan terhadap dunia politik. Mengingat pengalaman itu terjadi pada setiap individu diharapkan dengan adanya pengalaman dalam berorganisasi maka akan tercipta / membentuk karakter dari setiap calon untuk maju dalam pencalonan di lembaga legislatif.
4. Undang-undang yang dibuat agar lebih dapat menjamin keterwakilan perempuan di lembaga legislatif supaya aspirasi perempuan bisa tersalurkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astrid, Anugrah (2008)** *Keterwakilan perempuan dalam bidang politik*, rineka cipta jakarta
- Atmadja Kusuma, Sarwono ,(2007)** *Politik dan Perempuan*, Koekoesan Depok.
- Bahar, Ahmad, (1996),** *Biografi Politik Megawati Soekarno Putri*, Pena Cendekia Yogyakarta
- Budiardjo, Miriam , (2006)** *Dasar–Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dr. Alo, Liliweri,M.S (2002)** *makna budaya dalam komunikasi antar budaya*, Lkis yogyakarta
- Dr. Anwar,(2007).** *Manajemen pemberdayaan perempuan*, Alfabeta, Bandung.
- Dr. J. Winardi . SE.(2003)** *Teori organisasi dan pengorganisasian*, PT. Raja grafindo persada Jakarta.
- Dr. Sopiah, MM.(2008)** *Perilaku organisasional CV ANDI OFFSET* Yogyakarta
- Dr. Umar, Husain SE,(2009),** *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Drs. Damsar (2009)** *Pengantar sosiologi politik*, rineka cipta Jakarta
- Drs. H.M. Daryanto (1996)** *Administrasi pendidikan* Rineka cipta Jakarta
- Efrizal (2008),** *Analisis keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kampar*, Pekanbaru, skripsi.
- Hasibuan, Malayu (2007)** *Manajemen sumber daya manusia* bumi aksara Jakarta
- [http//Khozanah, Wordpress. com](http://Khozanah.Wordpress.com) 2010/12/28** Perempuan harus berpolitik dan turut mengambil kebijakan
- [http/Batak pos \\_online. Com](http://Batak_pos_online.Com) (2009)**
- Jacobus, Ranjabar (2006)** *system sosial budaya Indonesia*, ghalia Indonesia bogor
- Julika, Riri,** *Keterwakilan Perempuan sebagai calon Legislatif pada partai politik peserta pemilu Legislatif Propinsi Riau Tahun 2004*, Pekanbaru Skripsi

**Lestari, yuni (2008)** *Persepsi dan partisipasi anggota DPRD Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta terhadap kesetaraan gender* Universitas diponegoro semarang skripsi

**Markus, Gunawan,(2008)** *Buku pintar calon anggota dan anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD )* Visi media Jakarta

**Mulia, Musdah, Siti dan Farida, Anik ,(2005)** *Perempuan dan Politik*, PT. Gramedia Pustaka utama Jakarta.

**Muslikhati, Siti, (2004),** *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan islam*, gema insani, Jakarta.

**Prof. Dr.Sugiyono (2009),** *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R dan D* Alfabeta bandung

**Rosita, Novita (2005)** *Kebijakan partai politik dalam merespon pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2009*. Skripsi

**S. Darmadi (2010)** *partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan betonisasi jalan pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan* Universitas sebelas maret Surakarta skripsi

**Sadli, Saparinah,(2010),***berbeda tetapi setara, pemikiran tentang kajian perempuan*, Kompas, Jakarta.

**Setiadi Elly, dkk (2006)** *ilmu sosial dan budaya dasar*, Kencana prenada media group Jakarta.

**Sihite, Romani , (2007)** *Perempuan kesetaraan, keadilan, suatu tinjauan berwawasan jender*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Subadio, Haryati dan Sadli, Saparinah. (1990),** *Kartini Pribadi Mandiri*, PT Gramedia Pustaka Utama . Jakarta.

**Sudirman, M, Thamrin, Husni, (2009),** *Gender dalam kultur agraris*, lembaga penelitian dan pengembangan UIN suska.

**Surbakti, Ramlan (1996),** *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta.

**WWW, Bogor Kultural, University,(2008).**skripsi